

PERUBAHAN RKPD 2023

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 521);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari;

- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
 - c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan,
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - f. penutup.
2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan dua pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3B

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2023.
 - (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2023.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 7 - 2023

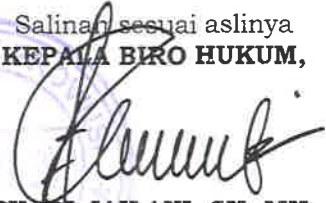
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Tujuan.....	I-3
1.3 Dasar Hukum	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2023	II-1
2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan II 2023	II-1
2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan	II-1
2.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2023	II-25
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD	II-44
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan II-2023	III-1
3.1.2. Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan II 2023	III-13
3.1.3. Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2023 Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2023	III-26
3.1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2023	III-31
3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah	III-33
3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023.....	III-34
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2023.....	III-38
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2023	III-39
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-7
4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, Prioritas Nasional 2023 dan RPJMD Tahun 2019-2024	IV-8
4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2019 - 2024	IV-10
4.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung.....	IV-12
4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-13
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
5.1 Program Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VIII-1



DAFTAR GAMBAR

BAB II

Gambar 2. 1 Persentase Penumpang Moda Transportasi Darat, Laut dan Udara Provinsi Lampung Mei 2023.....	II-21
Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Penghunian kamar Hotel Berbintang, Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Provinsi Lampung April 2023.....	II-23

BAB IV

Gambar 4. 1 Sasaran dan Target Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-22
Gambar 4. 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Lampung.....	IV-48

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2. 1 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	II-2
Tabel 2. 2 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Kereta Api, Kapal Ferry dan Pesawat Udara di Provinsi Lampung	II-22
Tabel 2. 3 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung April 2023	II-25
Tabel 2. 4 Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I-2023.....	II-27

BAB III

Tabel 3. 1 Struktur PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha TW I 2023	III-3
Tabel 3. 2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB TW I 2023 Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha (Persen)	III-4
Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran (Persen).....	III-5
Tabel 3. 4 Struktur PDRB (ADHB) Provinsi Lampung TW I 2023 Menurut Pengeluaran (Persen)	III-6
Tabel 3. 5 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Prov Lampung.....	III-9
Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung	III-14
Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Ribuan Jiwa) ...	III-18
Tabel 3. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Berdasarkan Komposit 2017-2022	III-23
Tabel 3. 9 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016 – 2022	III-25
Tabel 3. 10 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi.....	III-31
Tabel 3. 11 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 Provinsi Lampung	III-37
Tabel 3. 12 Kerangka Keuangan Daerah pada	III-40
Tabel 3. 13 Kerangka Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023	III-42

BAB IV

Tabel 4. 1 Program Prioritas Nasional di Provinsi Lampung	IV-6
Tabel 4. 2 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023.....	IV-7
Tabel 4. 3 Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung.....	IV-8
Tabel 4. 4 Keselarasan RPJMD 2019-2024, Prioritas Pembangunan Daerah 2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2023	IV-9
Tabel 4. 5 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Provinsi Lampung 2023 dengan RPJMD 2019-2024	IV-11
Tabel 4. 6 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2023	IV-14

BAB V

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2023 .	V-2
--	-----

DAFTAR GRAFIK

BAB II

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2017 - 2022	II-3
Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I-2023.....	II-3
Grafik 2. 3 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional.....	II-5
Grafik 2. 4 Target dan Capaian PDRB Perkapita Provinsi Lampung 2022.....	II-5
Grafik 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia 2017-2022.....	II-7
Grafik 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen).....	II-8
Grafik 2. 7 Struktur Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Februari-2023.....	II-8
Grafik 2. 8 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung Februari-2023.....	II-9
Grafik 2. 9 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung	II-10
Grafik 2. 10 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia	II-11
Grafik 2. 11 Capaian Kinerja Inflasi Provinsi Lampung.....	II-11
Grafik 2. 12 Tingkat Inflasi Bulanan di kota Bandar Lampung dan Metro bulan Juni 2023	II-12
Grafik 2. 13 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2022	II-14
Grafik 2. 14 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2022	II-15
Grafik 2. 15 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Juni 2023	II-16
Grafik 2. 16 Capaian Nilai Tukar Usaha Petani Provinsi Lampung.....	II-17
Grafik 2. 17 Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2019-2022.....	II-18
Grafik 2. 18 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2022	II-20

BAB III

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera dan Nasional	III-1
Grafik 3. 2 Capaian Kinerja Inflasi Provinsi Lampung	III-7
Grafik 3. 3 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional.....	III-8
Grafik 3. 4 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	III-10
Grafik 3. 5 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Juni 2023	III-11

Grafik 3. 6 Capaian Nilai Tukar Usaha Petani Provinsi Lampung.....	III-12
Grafik 3. 7 Struktur Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung	III-13
Grafik 3. 8 Tingkat Pengangguran Februari 2022 – Februari 2023 Provinsi Lampung.....	III-13
Grafik 3. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)	III-14
Grafik 3. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung Agustus 2020-Agustus 2022	III-15
Grafik 3. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota	III-16
Grafik 3. 12 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional	III-17
Grafik 3. 13 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 – 2021 (persen).....	III-19
Grafik 3. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung	III-20
Grafik 3. 15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia	III-21
Grafik 3. 16 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2022.....	III-24

PERUBAHAN RKPD 2023
PROVINSI LAMPUNG



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional telah ditetapkan RKP Tahun 2023 yang telah dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada kebijakan prioritas nasional, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada pemutakhiran RKP tahun 2023. Penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan.



Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2023 merupakan perencanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Diharapkan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kondisi saat ini dan prospek perekonomian pasca Covid 19 mengakibatkan perlunya kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang fokus bagi pemulihan dan penguatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 adalah **"Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah"** yang telah diselaraskan dengan tema RKP 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan fokus prioritas untuk Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,



Reformasi Birokrasi, Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya serta Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Merujuk Pasal 343 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, pada tahun 2023 juga dilakukan penyesuaian akibat perubahan kebijakan penganggaran terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun 2023;

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam rangka memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen tersebut dapat dicapai, serta untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

1.2 Tujuan

Memperhatikan dinamika pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menjaga konsistensi antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023 yang akan disusun;
- Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam struktur yang akan disusun dalam Perubahan APBD T.A 2023;
- Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika aspirasi masyarakat yang sejalan dengan permasalahan aktual dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah serta Prioritas pembangunan Nasional;
- Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas melalui penajaman kegiatan/sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

- 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 590);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian



Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1335);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

1.2. Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

1.4. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II-2023.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan samapai denga Triwulan II-2023 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2023.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan II-2023, Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan II-2023, Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2023 Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2023 serta Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2023.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2023.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, Prioritas Nasional 2023 dan RPJMD Tahun 2019-2024

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2023 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023.

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2019 - 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2023, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VI PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2023

2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan II-2023

2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan

Penetapan indikator makro pembangunan daerah pada dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran pencapaian berbagai program dan kegiatan pembangunan pemerintah pada tahun berjalan. Untuk keperluan tersebut, diperlukan pengukuran/evaluasi secara triwulan atas target yang telah tercantum pada dokumen RKPD Tahun 2023. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat trend dan proyeksi ketercapaian target tersebut pada akhir tahun anggaran. Di tengah upaya akselerasi pemulihan perekonomian melalui peningkatan produktivitas pada setiap sektor, perlu disusun berbagai upaya yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan sistematis agar target indikator makro pembangunan dapat tercapai.

Selain itu terdapat mekanisme RKPD Perubahan yang memungkinkan dilakukannya revisi atas target-target makro tersebut, sehingga pendekatan program dan kegiatan yang akan dilakukan lebih realistis dan memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Revisi ini yang kemudian berakibat pada penyesuaian pada volume dan pagu kegiatan, termasuk dimungkinkan munculnya beberapa kegiatan baru dalam upaya melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk mengevaluasi sejauhmana program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Berikut kami sajikan data target sasaran makro pembangunan tahun 2023 Provinsi Lampung, beserta tingkat capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2023	Sasaran pada APBD 2023	Capaian s/d Tw II-2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	4,96 (TW I-2023)
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	43 - 44	43 - 44	45,10 (2022)
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,3 - 70,6	70,3 - 70,6	70,45 (2022)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3 - 4,0	4,3 - 4,0	4,18 (Feb 2023)
5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,9 - 11,4	11,9 - 11,4	11,11 (Mar 2023)
6	Indeks Gini	0,302 - 0,319	0,302 - 0,319	0,324 (Mar 2023)
7	Inflasi (%)	3 ± 1	2 - 4	3,24 (Juni 2023)
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	74,87	77	76,85 (2022)
9	Nilai Tukar Petani	104 - 105	104 - 105	108,96 (Juni 2023)
10	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,04	9,55	13,63 (2022)
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.066	7,066	12,84 (2022)

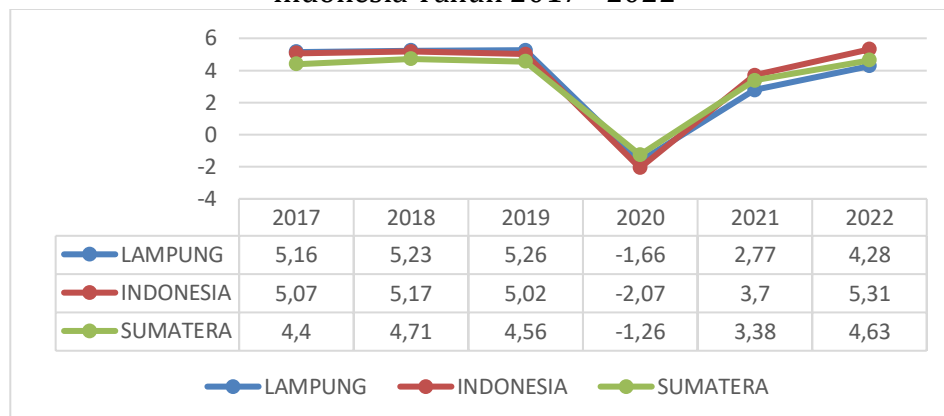
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, diolah 2023

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat tergambar beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2017-2022, pasca pandemic Covid-19 menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung trend yang terus meningkat. Untuk Tahun 2022, pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (*c to c*), tumbuh sebesar 4,28 persen, menguat dibanding Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen. Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,31) dan Sumatera (4,63). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2022 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 414.131,42 Miliar dan Rp. 257.534,19 Miliar.

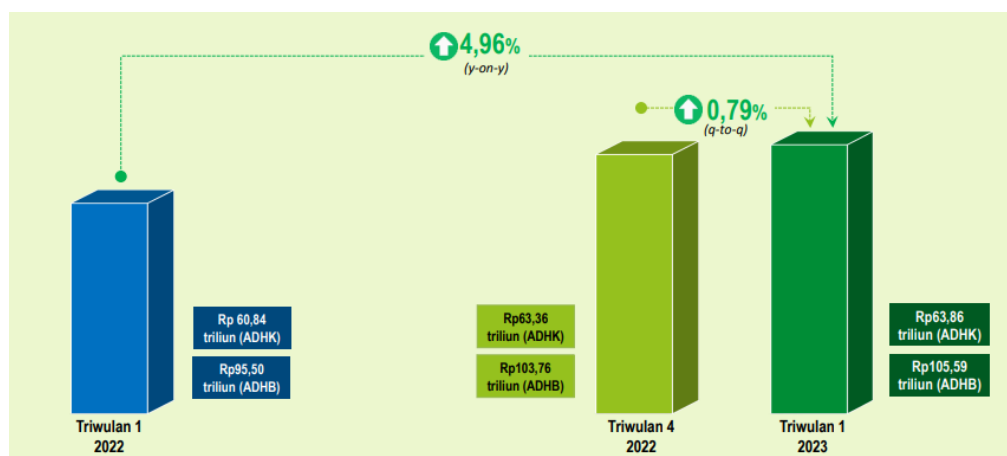
Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2017 - 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Memasuki Tahun 2023 - pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami penguatan sejalan dengan upaya pemulihan perekonomian. Pada Triwulan I-2023 sebesar 4,96% (yoy) tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan I-2022 yang hanya sebesar 2,86%. Dari sisi produksi Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,80. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,12 persen.

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023



Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen (q-to-q), menguat dibanding capaian triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,13 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,72 persen.

2. Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan dari Rp. 37 juta menjadi Rp. 42 juta. Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan pendapatan perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp 45,10 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 71 Juta Rupiah pada tahun 2022.

Grafik 2. 3 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Nasional, 2022

Bila dibandingkan capaian PDRB Perkapita pada Tahun 2021, PDRB Perkapita Provinsi Lampung Tahun 2022, meningkat sebesar Rp. 4,15 Juta atau bertumbuh sebesar 10,13%. Capaian ini cukup baik ditengah upaya pemulihan ekonomi serta upaya peningkatan produktivitas di semua sektor yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB Perkapita Provinsi Lampung di Tahun 2022 sebesar Rp. 45,10 Juta juga melebihi dari target Indikator Makro RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 44 Juta dengan capaian 102,50%.

Grafik 2. 4 Target dan Capaian PDRB Perkapita Provinsi Lampung 2022



Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Lampung, data diolah, 2023

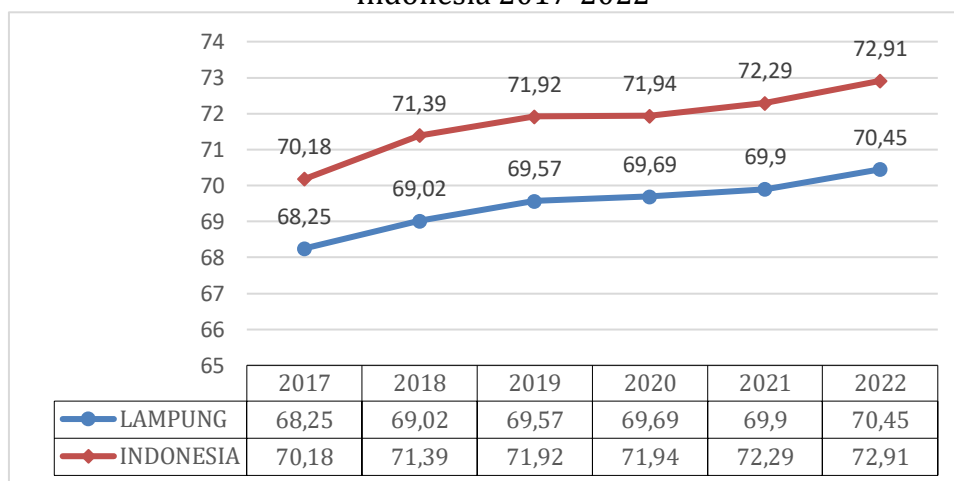
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Terdapat 3 manfaat dalam hal pengukuran IPM diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan. IPM Lampung meningkat dari 64,87 pada tahun 2012 menjadi 70,45 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Lampung rata-rata tumbuh sebesar 0,85 persen per tahun. Untuk pertama kali, Provinsi Lampung masuk dalam kategori “TINGGI” dengan nilai IPM 70,45. IPM Provinsi Lampung Tahun 2022 meningkat 0,55 point atau tumbuh 0,79 persen dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan IPM 2022, didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen

pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita meningkat 298.000 poin dibanding tahun 2021. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 72,91

Grafik 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia 2017-2022

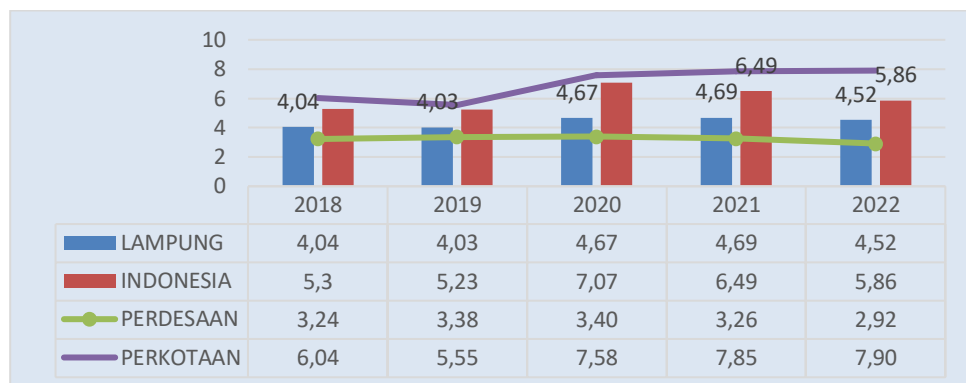


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

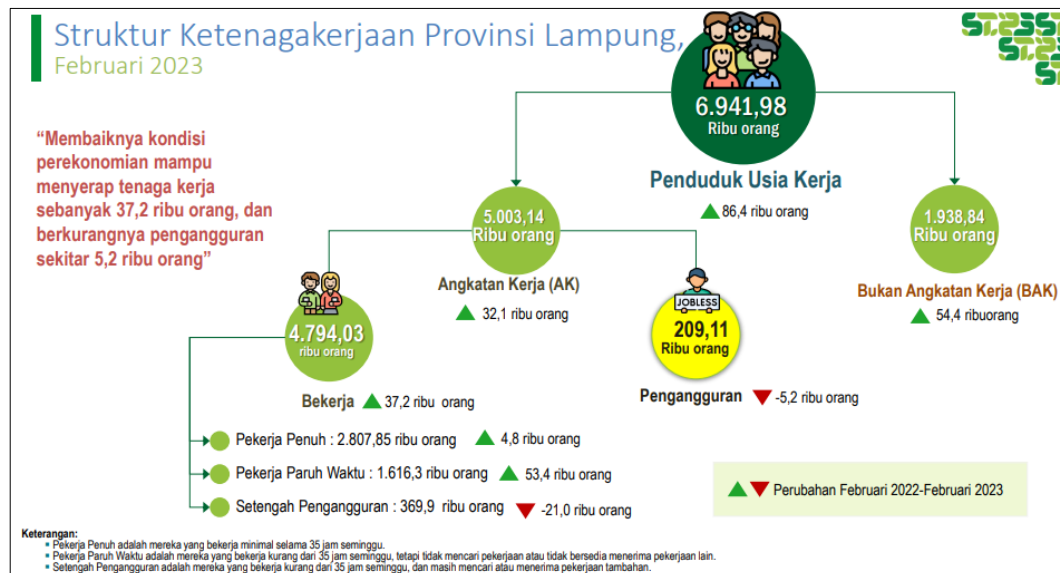
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,52.

Grafik 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

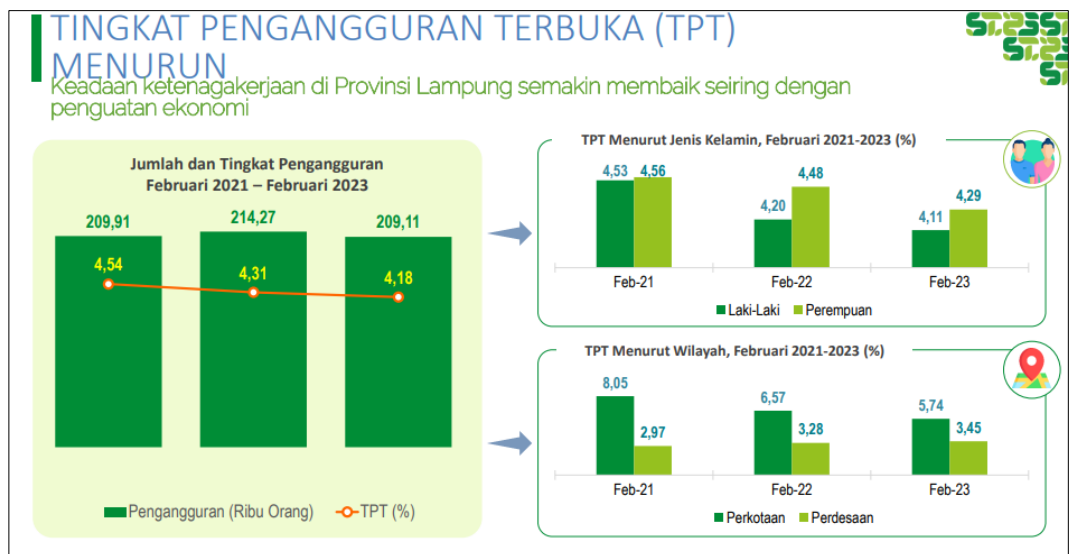
Grafik 2. 7 Struktur Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Februari-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 4,18 %, capaian ini menurun 0,34% dibandingkan Agustus 2022 (4,52%). Capaian TPT Provinsi Lampung juga lebih baik dibandingkan TPT Nasional pada Februari 2023 sebesar 5,45%. Berikut capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023:

Grafik 2. 8 Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung Februari-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023

5. Tingkat Kemiskinan

Setelah pandemic Covid 19, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan Lampung Maret 2023 mengalami penurunan dibandingkan September 2022. Secara persentase turun dari 11,44% pada September 2022 menjadi 11,11% pada Maret 2023 atau jumlah penduduk Miskin turun dari 995,59 ribu menjadi 970,67 ribu orang.

Tahun 2023, angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,36 persen. Untuk September 2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Grafik 2. 9 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung



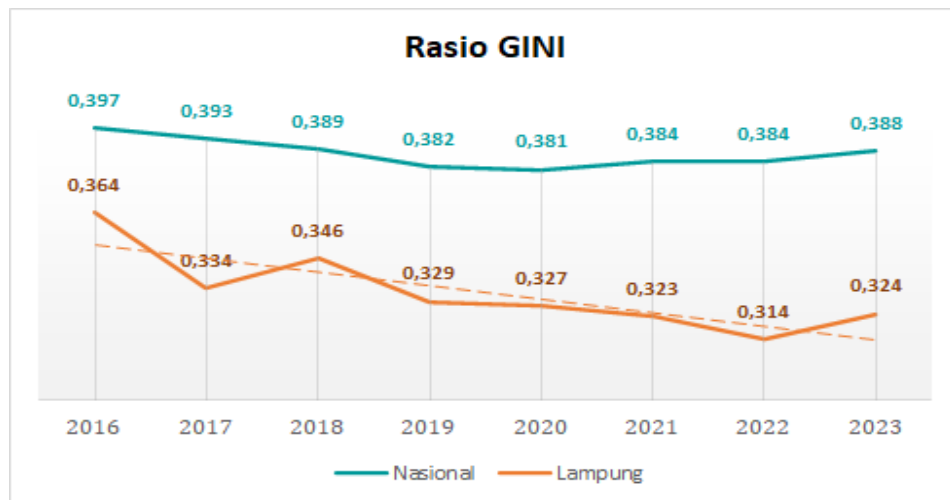
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

6. Gini Rasio

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2016 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,364 tahun 2016 menjadi 0,324 pada Tahun 2023, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,388). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar Kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong distribusi pemerataan perekonomian di daerah.

Grafik 2. 10 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2023

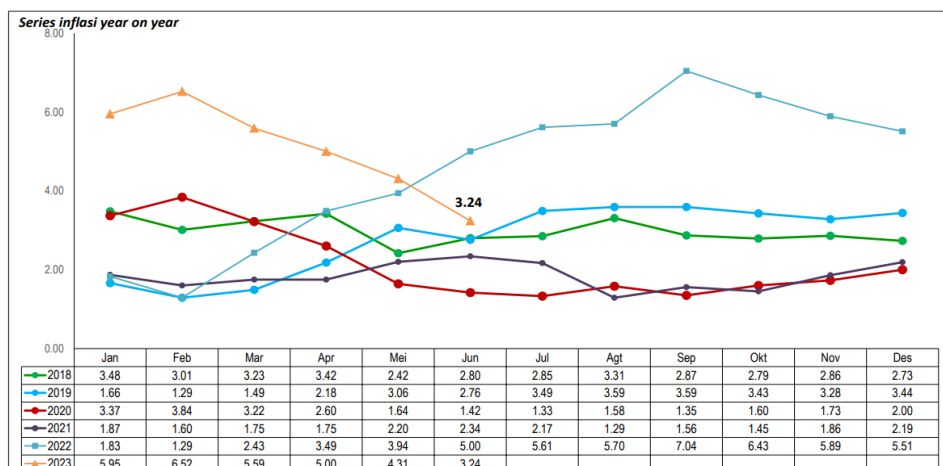


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

7. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi di Provinsi Lampung merupakan rata-rata dari tingkat inflasi di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada bulan Juni 2023 sebesar yaitu 3,24% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 3,52%. Secara umum, tingkat inflasi di Provinsi Lampung masih terjaga dengan baik. Kondisi ini terutama disumbang oleh terjaganya pasokan barang dan jasa dari tahap produksi sampai ke tangan konsumen akhir.

Grafik 2. 11 Capaian Kinerja Inflasi Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023, diolah

Pada Juni 2023, terjadi inflasi years on years (yoy) gabungan dua kota di Lampung sebesar 3,24 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,29. Inflasi yoy Kota Bandar Lampung sebesar 3,34 persen, dengan IHK sebesar 116,26 dan inflasi yoy Kota Metro sebesar 2,40 persen dengan IHK sebesar 116,55.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau 1,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 4,75 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga 1,58 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,53 persen; kelompok kesehatan 1,92 persen; kelompok transportasi 8,98 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 3,08 persen; kelompok pendidikan 9,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,54 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,64 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

Grafik 2. 12 Tingkat Inflasi Bulanan di kota Bandar Lampung dan Metro bulan Juni 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

8. Kemantapan Jalan

Transportasi merupakan kunci utama pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka daerah-daerah ekonomi potensial yang terisolir, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas. Tantangan pembangunan bidang infrastruktur jalan adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7-10% pertahun. Permasalahan kerusakan jalan selama ini disebabkan oleh overload kendaraan, konstruksi yang tidak sesuai kriteria kelas jalan dan dipicu oleh genangan air di badan jalan akibat minimnya saluran drainase. Permasalahan 'pembangunan jalan yang tidak terintegrasi dengan saluran drainase' merupakan issue Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pembangunan drainase membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit sementara kemampuan pendanaan relatif terbatas, sehingga pembangunan jalan lebih berfokus untuk mengejar target panjang jalan/jalan mantab.

Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah yang dijabarkan dalam sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang didukung oleh indikator kinerja utama kemantapan jalan provinsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung.

Grafik 2. 13 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2022

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2015	67,02	32,98	1,97
2016	70,02	29,96	3,00
2017	77,04	22,96	7,02
2018	79,89	20,11	2,85
2019	74,41	25,58	-5,47
2020	75,92	24,08	1,51
2021	74	26	-1,92
2022	76,85	23,15	2,85

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2023 diolah

Pada Tahun 2022 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.693,273 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 391,985 Km dan Kondisi baik dan sedang sepanjang 1.301 Km. Dari Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat tersebut hanya tertangani sepanjang 159,44 Km terdiri atas 84,125 Km Pekerjaan Pembangunan Jalan dan 74,415 Km berupa pekerjaan rehabilitasi jalan.

9. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Atau dengan kata lain, NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Selain menjadi indikator dalam mengukur kesejahteraan petani, NTP juga menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk lain. Ada tiga angka NTP, yaitu :

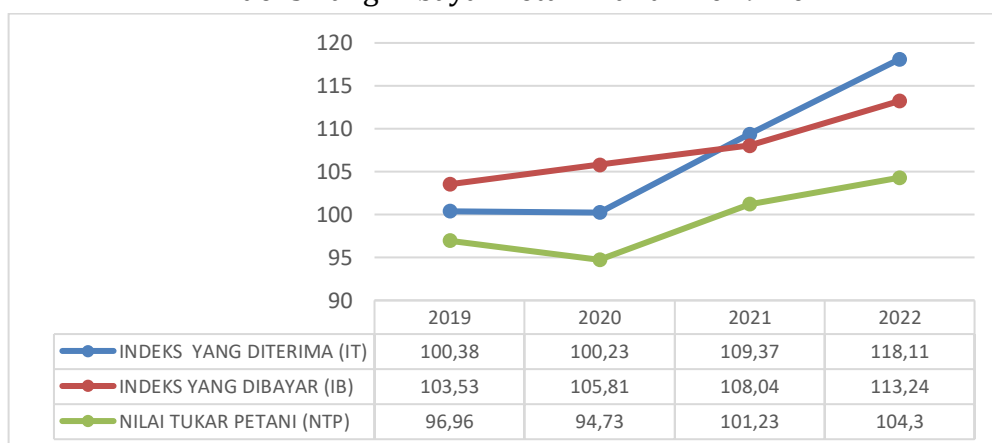
- NTP > 100 menunjukkan petani mengalami surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, sehingga pendapatan petani naik lebih besar daripada pengeluarannya.
- NTP < 100 menunjukkan petani mengalami defisit dimana harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga

konsumsinya, sehingga pendapatan petani turun, lebih kecil daripada pengeluarannya.

- c) $NTP = 100$ menunjukkan petani mengalami impas dimana kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya, sehingga pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

Secara tahunan, NTP Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Tahun 2022, terlihat dari Indeks Yang Diterima (118,11) melebihi Indeks Yang Dibayar Petani (113,24). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan NTP pada Tahun 2022, daya beli petani di Provinsi Lampung semakin kuat yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan petani.

Grafik 2. 14 Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar Petani Tahun 2019-2022

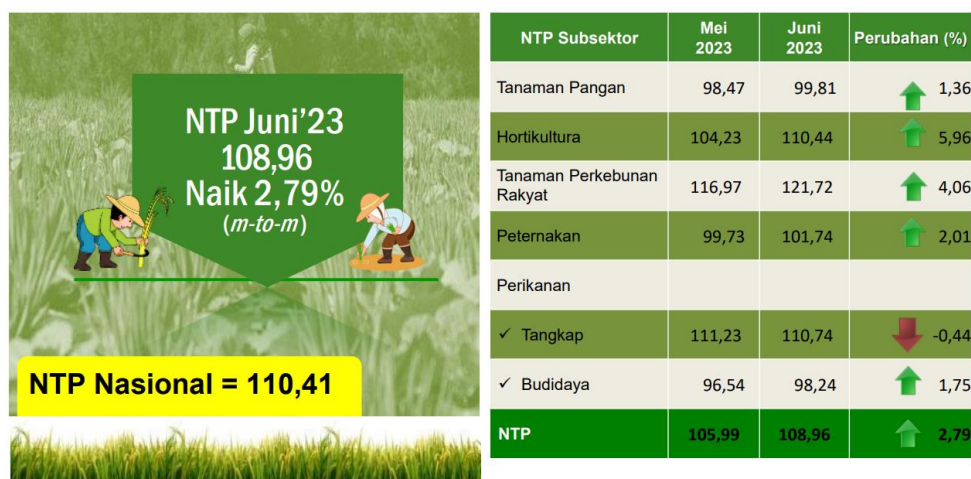


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Capaian NTP Provinsi Lampung sampai dengan Juni Tahun 2023 adalah sebesar 108,96, meningkat dibandingkan dengan data capaian NTP tahunan Provinsi Lampung Tahun 2022 (104,30). NTP Provinsi Lampung Juni 2023 sebesar 108,96 atau naik 2,79 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 3,21 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik sebesar 0,41 persen.

Peningkatan NTP Juni 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,36 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 5,96 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,06 persen, subsektor peternakan sebesar 2,01 persen, dan subsektor perikanan budidaya sebesar 1,75 persen. Sementara itu, NTP pada subsektor lainnya mengalami penurunan NTP yaitu subsektor perikanan tangkap sebesar 0,44 persen. Berikut capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung sampai dengan Juni Tahun 2023.

Grafik 2. 15 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Juni 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023, diolah

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dengan Indeks Harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat It dibandingkan dengan indeks BPPBM.

Pada Juni 2023, NTUP Provinsi Lampung naik sebesar 3,03 persen. Peningkatan NTUP terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,54 persen; subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,28 persen; subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,40 persen; subsektor peternakan sebesar 2,13 persen; dan subsektor perikanan

budidaya sebesar 1,93 persen. Sedangkan NTUP Sektor perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 0,26%. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya Provinsi Lampung, Mei-Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Grafik 2. 16 Capaian Nilai Tukar Usaha Petani Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023

10. Persentase Peningkatan PAD (%)

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBK.

Grafik 2. 17 Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2019-2022

NO.	URAIAN	REALISASI				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	7.266.993.438.827,88	7.019.319.471.883,00	7.469.469.346.029,00	6.836.946.972.193,71	-1,82%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.018.067.291.160,00	2.842.286.479.070,00	3.249.669.847.265,00	3.678.302.294.580,71	7,23%
1.1.1	Pajak Daerah	2.627.888.230.394,00	2.386.345.268.304,00	2.721.138.045.704,00	3.126.137.885.658,00	
1.1.2	Retribusi Daerah	11.069.477.866,00	17.080.208.104,00	14.664.095.996,00	6.602.045.154,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan	27.837.905.349,00	29.873.630.623,00	33.335.927.752,00	45.568.658.794,74	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	351.271.677.551,00	408.987.372.039,00	480.531.777.813,00	499.993.704.973,97	
1.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.664.929.542.285,00	2.461.886.209.957,00	4.209.156.682.009,00	3.118.930.589.890,00	12,48%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.049.446.772,00	123.204.760.040,00			
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	31.825.503.773,31	34.589.203.086,00		-	
1.2.3	DAU	1.906.780.297.000,00	1.732.551.921.000,00			
1.2.4	DAK	581.870.716.694,00	571.540.325.831,00			
1.2.5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	4.201.782.231.009,00	3.100.575.550.394,00	
1.2.6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	7.374.451.000,00	18.355.039.496,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.621.730.798.558,00	1.668.712.684.856,00	10.642.816.755,00	39.714.087.723,00	58,90%
1.3.1	Hibah	11.362.590.000,00	8.946.876.858,00	10.565.423.805,00	39.714.087.723,00	
1.3.2	Pendapatan Lainnya	1.583.611.845.558,00	1.659.765.807.998,00	77.392.950,00	-	



Pertumbuhan pendapatan daerah dalam kurun waktu 2019-2022 mengalami negatif 1,82 persen merupakan dampak dari sektor perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19, namun dari sisi Pendapatan Asli Daerah tumbuh 7,23 persen yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan kebijakan-kebijakan disektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu fungsi *budgeter* penting untuk meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah guna mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

11. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

Secara alamiah, gas rumah kaca dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari, namun sejak tahun 1950-an emisi gas CO₂ meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Sumber penghasil gas rumah kaca banyak ditimbulkan oleh aktivitas manusia, misalnya penggunaan energi listrik, aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan juga membakar sampah. Beragam aktivitas tersebut kemudian menimbulkan gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida (CO₂), nitrogen dioksida (N₂O), metana (CH₄), dan freon (SF₆, HFC dan PFC).

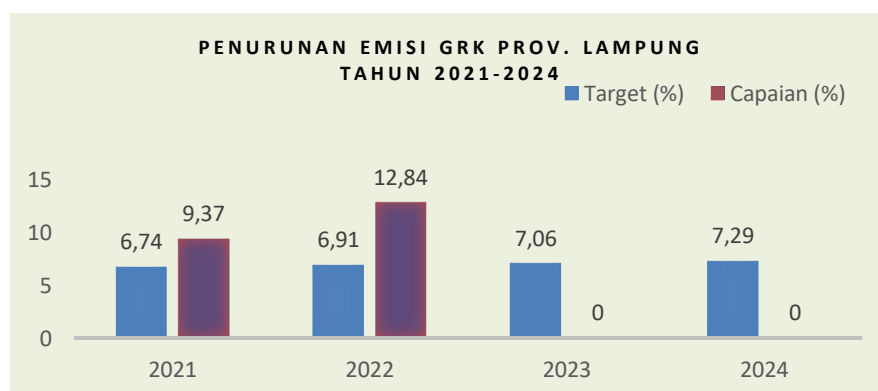
Efek rumah kaca sebetulnya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi, supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan. Kondisi itu ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut dan perubahan iklim yang ekstrem.

Dalam upaya mengurangi Gas Rumah Kaca, negara-negara di dunia membuat komitmen yang ditetapkan dalam Dokumen Kontribusi

yang Ditetapkan Secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Melalui NDC, Perjanjian Paris mewajibkan masing-masing negara untuk menyusun dan mengkomunikasikan aksi iklim mereka pasca- tahun 2020. Berbagai aksi iklim ini harus dapat membawa kita untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris, yakni mencapai puncak emisi GRK global secepat-cepatnya dan mengurangi emisi GRK dengan cepat setelahnya sehingga dunia mencapai keseimbangan antara emisi GRK yang dihasilkan dan yang diserap pada paruh kedua abad ini. Indonesia juga turut mengambil peran untuk mengurangi Emisi karbon/Gas Rumah Kaca dan masuk menjadi salah satu indikator pembangunan termasuk di Provinsi Lampung. Upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2022 yaitu 12,84, realisasi ini merupakan hasil perhitungan dari PEP Bappenas, meski sempat turun sebesar 0,12% menjadi 6,74 di tahun 2021.

Grafik 2. 18 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2022

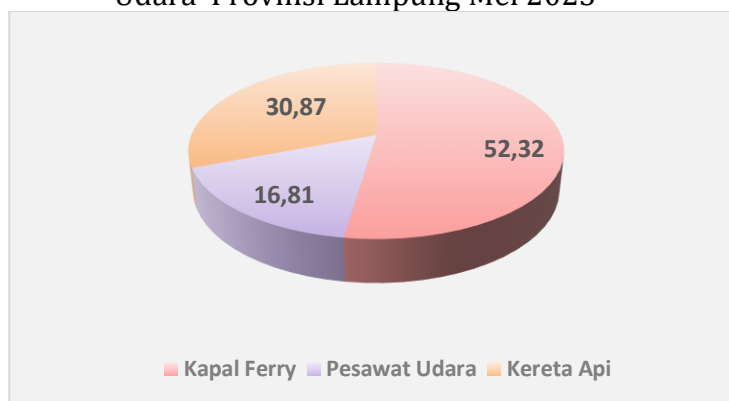


Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2022,diolah

Selain data Makro Pembangunan diatas, terdapat beberapa data sektoral yang dapat menggambarkan perkembangan capaian pembangunan antara lain :

1. Perkembangan transportasi dapat menggambarkan mobilitas orang dan barang yang ada di suatu wilayah. Bila dilihat dari moda transportasi, pada Bulan Mei 2023, masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi laut dengan Kapal Ferry yang menempati posisi teratas sebesar 52,32 persen, Kereta Api (30,87) dan Pesawat Udara (16,81).

Gambar 2. 1 Persentase Penumpang Moda Transportasi Darat, Laut dan Udara Provinsi Lampung Mei 2023



Sumber : BPS 2023, diolah

Total penumpang yang berangkat menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara pada April 2023 sebanyak 181.065 orang, naik sebesar 46,49 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 123.599 orang. Kenaikan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi terjadi pada moda transportasi kapal ferry yaitu sebesar 178,43 persen, diikuti oleh keberangkatan penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat udara sebesar 0,75 persen.

Namun sebaliknya keberangkatan penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api mengalami penurunan sebesar 5,85 persen.

Jika dibandingkan dengan keadaan April 2022 jumlah penumpang yang berangkat menggunakan moda transportasi darat,

laut dan udara naik sebesar 140,05 persen yaitu dari 75.428 orang menjadi 181.065 orang. Kenaikan keberangkatan penumpang tertinggi terjadi pada moda transportasi kapal ferry sebesar 440,48 persen, diikuti oleh penumpang yang berangkat dengan menggunakan moda transportasi kereta api sebesar 65,45 persen dan keberangkatan penumpang menggunakan moda transportasi pesawat udara sebesar 26,18 persen. Dapat disimpulkan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan selama satu tahun terakhir ini.

Tabel 2. 2 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Kereta Api, Kapal Ferry dan Pesawat Udara di Provinsi Lampung

Uraian	Keberangkatan Penumpang			% Perubahan Bulan n, n-1	% Perubahan Tahun n, n-1
	April 2022	Maret 2023	April 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kereta Api	33.781	59.366	55.892	-5,85	65,45
Kapal Ferry	17.529	34.027	94.740	178,43	440,48
Pesawat Udara	24.118	30.206	30.433	0,75	26,18
Jumlah	75.428	123.599	181.065	46,49	140,05

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2. Nilai Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan aktivitas perekonomian, mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas sektor pariwisata.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada April 2023 tercatat 46,00 persen, turun 2,99 poin dibanding TPK hotel berbintang pada Maret 2023 yang tercatat sebesar 48,99 persen. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2022 dimana TPK hotel berbintang tercatat sebesar 42,20 persen, TPK hotel berbintang ini naik sebesar 3,80 poin.

Jumlah tamu hotel berbintang selama April 2023 sebanyak 55.062 orang, terdiri dari 194 orang tamu asing dan 54.868 orang tamu domestik. Jumlah tersebut turun sebanyak 1.782 orang (3,13 persen)

dibandingkan Maret 2023 yang tercatat sebanyak 55.176 orang, terdiri dari 308 orang tamu asing dan 54.868 orang tamu domestik.

Rata-rata Lama Menginap Tamu adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap. Rata-rata lama menginap tamu ini dapat dibedakan antara tamu asing dan tamu domestik. Rata-rata lama tamu menginap kondisi April 2023 pada hotel berbintang tercatat 1,34 hari. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,15 hari, bila dibandingkan dengan rata-rata lama menginap bulan Maret 2023 yang tercatat 1,49 hari. Rata-rata tamu asing menginap pada April 2023 selama 1,55 hari, sedangkan rata-rata tamu domestik menginap selama 1,34 hari.

Gambar 2. 2 Perkembangan Tingkat Penghunian kamar Hotel Berbintang, Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Provinsi Lampung April 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023.

- Perkembangan perdagangan luar negeri yang ada di Provinsi Lampung digambarkan dengan nilai ekspor dan impor.

Nilai Ekspor Provinsi Lampung pada April 2023 mencapai US\$316,50 juta, mengalami penurunan sebesar US\$141,55 juta atau turun 30,90 persen dibandingkan Maret 2023 yang mencapai



US\$458,05 juta. Nilai ekspor April 2023 jika dibandingkan dengan April 2022 yang tercatat US\$374,80 juta, mengalami penurunan sebesar US\$58,30 juta atau turun 15,55 persen.

Struktur Nilai Ekspor Provinsi Lampung, masih didominasi Sektor Industri Pengolahan, namun jika dibandingkan dengan April 2022, terjadi penurunan pada sektor industri pengolahan sebesar 16,34 persen, pertambangan dan lainnya turun sebesar 6,88 persen, pertanian turun sebesar 37,38 persen. Secara kumulatif dari Januari-April 2023 jika dibandingkan dengan Januari-April 2022 ekspor Provinsi Lampung mengalami penurunan pada sektor industri pengolahan turun sebesar 10,46 persen dan sektor pertanian turun sebesar 28,85 persen. Sementara itu, sektor pertambangan dan lainnya naik sebesar 15,83 persen.

Nilai impor Provinsi Lampung pada April 2023 mencapai US\$129,69 juta, mengalami penurunan sebesar US\$50,00 juta atau turun 27,83 persen dibanding Maret 2023 yang tercatat US\$179,70 juta. Nilai impor April 2023 tersebut mengalami penurunan US\$129,68 juta atau turun 50,00 persen jika dibanding April 2022 yang tercatat US\$259,38 juta.

Struktur Nilai impor pada April 2023 dibanding Maret 2023 untuk bahan baku penolong turun sebesar 31,75 persen, dan barang modal turun 9,51 persen, sedangkan barang konsumsi peningkatan sebesar 332,31 persen. Jika dibandingkan dengan April 2022, bahan baku/penolong turun 52,52 persen, dan barang modal turun 44,18 persen, sementara itu barang konsumsi naik 160,49 persen. Nilai impor menurut penggunaan barang selama Januari-April 2023 dibandingkan selama Januari-April 2022, terlihat bahwa nilai impor bahan baku/penolong turun 35,72 persen, sedangkan barang konsumsi dan barang modal mengalami kenaikan masing-masing sebesar 195,52 persen dan 33,50 persen.

Nilai ekspor Provinsi Lampung pada April 2023 mencapai US\$316,50 juta, lebih tinggi dari nilai impor April 2023 sebesar

US\$129,69 juta. Kondisi ini menjelaskan bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada April 2023 mengalami surplus sebesar US\$186,80 juta.

Tabel 2. 3 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung April Tahun 2023

Uraian	Nilai (Juta US\$)				Perubahan April 2023 thd Maret 2023 (juta US\$)	Perubahan April 2023 thd Maret 2023 (persen)	Perubahan Jan-Apr 2023 thd Jan-Apr 2022 (persen)
	Maret 2023	April 2023	Januari-April 2022	Januari-April 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total ekspor	458,05	316,50	1.623,22	1.506,02	-141,55	-30,90	-7,22
Total impor	179,70	129,69	928,23	632,64	-50,00	-27,83	-31,84
Selisih	278,35	186,80	694,99	873,38			

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023.

Untuk 5 besar komoditas ekspor Provinsi Lampung pada April 2023 antara lain; (a) Lemak dan minyak hewan/nabati (b) Batu Bara, (c) Olahan dari buah-buahan/sayuran; (d) Bubur Kayu/Pulp, (e) Kopi, teh, rempah-rempah-rempah; ikan dan udang.

Untuk 5 besar komoditas impor Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : (a) Gula dan kembang gula sebesar 38,72%, (b) Ampas/sisa industri makanan 18,46% (c) Binatang hidup 10,81%, (d) Pupuk 5,97% (e) gandum-gandum 5,36%.

2.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2023.

Sesuai dengan Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD disusun berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun berkenaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini disampaikan evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun



2023. Dengan evaluasi ini nantinya akan diketahui capaian realisasi keuangan dan fisik dari masing masing Perangkat Daerah (PD) selama Triwulan II Tahun 2023.

Realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II-2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV										
							7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR		K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
1	PENDIDIKAN																						
111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	5.736.504.110.415	100	1.083.227.778.428	100	958.666.236.542	0,89	668.809.024	14,08	422.510.887.021					14,08	44,07	14,08	1.505.738.665.449	100	26,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
112	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA Terakreditasi Minimal B	75		71		73		N/A		N/A								N/A		N/A		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMK Terakreditasi Minimal B	75	2.424.935.771.038	65	595.241.072.801	73	731.344.907.000	N/A	1.405.400.607	N/A	5.998.862.357					0,82	N/A	601.239.935.158	N/A	24,79		
		Persentase SLB Terakreditasi Minimal B	75		65		73		N/A		N/A							N/A		N/A			
114	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kebutuhan minimal tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah dan khusus	66	47.479.476.400			100	12.881.900.000	N/A	1.298.749.400	N/A	5.205.778.800					N/A	40,41	N/A	5.205.778.800	N/A		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN																						
121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	240.057.175.785	100	63.920.066.822	100	73.471.602.297	16,85	5.902.298.946	52,97	29.700.644.059					52,97	40,42	52,97	93.620.710.881	16,85	39,00	Dinas Kesehatan
122	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase labkesda terakreditasi	100	1.013.019.524.135	100	157.982.947.489	100	192.548.167.528	50	3.495.142.850	50	60.374.821.436					50		50	218.357.768.925	50	21,56	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau beotensi bencana	100		100		100		14,57		50,42						50,42		50,42		14,57		
		Persentase pelayanan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	100		100		100		21,42		39,15						39,15		39,15		21,42		
		Persentase peraslinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91		94,63		90		22,1		46,4						46,4	31,36	46,4		24,28		
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Prevalensi wasting	4,51		7		5,43		2,8		2,4						2,4		2,4		62,08		
		Persentase penemuan kasus (CDR) TBC	79		55,6		78		18		24,67						24,67		24,67		22,78		
		Persentase FKTP terakreditasi	85		61,35		75		61,35		61,35						61,35		61,35		72,17		
		Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	100		33,33		100		66,67		100						100		100		66,67		
		123	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar		47		48.435.461.946		38,17		2.902.112.199	46	2.749.430.000	35,02	22.939.000	35,2	310.660.370				
124	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	100	1.401.000.000	93	466.961.500	96	220.000.000	48	6.117.000	96	112.625.000					100,00	51,19	96	579.586.500	96	41,37	Dinas Kesehatan
125	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas	75	1.992.131.491	100	316.642.600	66	600.000.000	13	17.016.800	40	110.947.700					60,61	18,49	40	427.590.300	40	21,46	Dinas Kesehatan
121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	1.483.738.516.946	82%	1.221.282.012.120	100	371.914.671.436	23,38	61.554.066.559	46,34	183.493.703.845					46,34	49,34	46,34	1.404.775.715.965	46,34	94,68	Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Moeloek

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
									1	2	3	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	
123	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase SDM Kesehatan yang sesuai standar kompetensi	100	2.254.503.000	82,5%	1.860.735.000	100	492.200.000	N/A	N/A	N/A					0,00	N/A	1.860.735.000	N/A	82,53	Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Moeleek		
121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	49.115.133.727	100	43.067.076.726	100	44.097.513.357	24,09	6.198.343.512	19,78	20.664.026.542				19,78	46,86	63.731.103.268	19,78	129,76	Rumah Sakit Jiwa		
122	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100	7.695.312.500	70	582.145.327	100	471.068.600			4,36	38.628.556				4,36	8,20	4,36	620.773.883	4,36	8,07	Rumah Sakit Jiwa	
123	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	610.000.000	16,67	89.268.500	100	18.624.000										89.268.500	0	14,63	Rumah Sakit Jiwa		
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	251.514.266.655	100	98.638.239.127	100	57.019.876.000	3,75	3.759.695.047	16,95	21.021.144.740				3,75	36,87	16,95	119.659.383.867	16,95	1,49	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	78	2.800.317.445.196	78,850	971.766.859.737	77	888.422.938.868	76,85	38.704.030.600	76	171.887.708.383				99,81	19,35	76	1.143.654.568.120	100	40,84	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	100	8.101.965.200	59,07	3.261.667.798	79,32	3.969.891.500	-	-	20,79	681.856.700				26,21		20,79	3.943.524.498	20,79	48,67	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tertib dan Tepat Waktu	100	78.131.921.473	42	97.986.082.778	100	52.831.544.710	3,39	7.745.878.394	22,37	24.333.997.919				22,37	46,06	22,37	122.320.080.697	22,37	156,56	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
132	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pembangunan, rehabilitasi dan pengembalian fungsi jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air lainnya yang ditingkatkan dalam kondisi baik	100	126.153.316.967	57	201.939.054.044	100	91.811.957.773	1,75	2.686.907.700	27,35	32.091.604.556				27,35	34,95	27,35	234.030.658.600	27,35	185,51	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																						
133	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	MENINGKATKAN KESESUAIAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100	2.500.000.000	100	7.595.221.260	100	3.507.104.000	0	43.851.500	N/A	130.157.750				3,71	N/A	7.725.379.010	N/A	309,015	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
134	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	MENINGKATKAN KESESUAIAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL	100	1.000.000.000	100	687.432.000	100	1.063.340.000	0	20.112.000	N/A	40.224.000				3,78	N/A	727.656.000	N/A	72,7656	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
135	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak	100	1.300.000.000	100	1.260.040.990	100	1.450.052.000	0	50.519.500	100	1.450.052.000				100,00	100	2.710.092.990	100	208,469	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
137	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase prasarana dan sarana (PSU) yang terbangun	100	37.602.298.759	100	1.259.622.230	100	34.784.847.000	10,42	42.784.000	100	34.748.847.000				10,42	99,90	100	36.008.469.230	100	95,7614	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
			1	2	3	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	14	
138	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	100	64.960.430.141	100	60.405.255.845	100	134.765.785.450	0	247.341.575	10	2.698.027.422					10,00	2,00	10	63.103.283.267	10	97,1411	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
139	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100	5.750.634.000	100	11.640.234.468	100	21.617.214.550	0	6.962.850	33,33	313.349.500					33,33	1,45	33,33	11.953.583.968	33,33	207,865	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100	4.400.000.000	100	6.154.534.863	100	6.920.000.000	0	2.208.572.900		1.134.490.975						16,39		7.289.025.838	0	165,66	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	16.152.015.600	100	20.714.264.289	100	20.714.264.289	10,82	2.441.027.225	23,67	5.277.597.029					23,67	25,48	23,67	25.991.861.318	23,67	160,92	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
142	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100	700.000.000	100	495.635.270	100	500.000.000	0	49.565.200	16,67	447.471.700					16,67	89,49	16,67	943.106.970	16,67	134,73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
143	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan rumah layak huni	100	3.800.000.000	100	2.108.513.608	100	22.600.000.000	0	83.910.900	2,78	1.543.922.600					2,78	6,83	2,78	3.652.436.208	2,78	96,1167	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
145	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU dibangun dikawasan permukiman sesuai kebutuhan	100	9.246.735.000	100	65.420.503.617	100	107.043.157.000	0	55.414.900	4	5.797.782.800					4,00	5,42	4	71.218.286.417	4	770,199	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2106	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	100	700.000.000	100	135.120.000	100	600.000.000	0	14.717.200	N/A	184.113.200					30,69	N/A		319.233.200	N/A	45,6047	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
21010	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	100	600.000.000	100	921.111.446	100	380.000.000	0	17.198.000	N/A	46.534.000					12,25	N/A		967.645.446	N/A	161,274	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	KENTENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																						
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	213.104.179.299	100	124.353.229.744	100	42.062.751.608	12,12	3.865.832.535	46,1	20.343.643.602					46,1	48,36	46,1	144.696.873.346	46,1	67,90	Satuan Polisi Pamong Praja
152	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Penyelesaian Potensi Gangguan Trantibum Di Lingkup Pemprov Lampung	100	22.673.506.200	100	13.358.540.050	100	4.782.195.700	2,67	289.450.000	27,76	1.506.864.200					27,76	31,51	27,76	14.865.404.250	27,76	65,56	Satuan Polisi Pamong Praja
	SOSIAL																						
161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100	121.609.747.345	97,14	24.822.399.244	100	24.599.579.909	14,5	3.189.274.920	44,36	12.054.040.404					44,36	49,00	44,36	36.876.439.648	44,36	30,32	Dinas Sosial
162	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial	100	2.583.716.900	90	769.644.800	100	526.682.950	6,25	11.903.800	37,5	237.007.600					37,5	45,00	37,5	1.006.652.400	37,5	38,96	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Pengang- gung Jawab
									I		II		III		IV								
									1	2	3	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	
163	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	1.000.200.000	100	235.390.645	100	249.999.500	33,33	41.976.500	53,33	84.152.500					53,33	33,66	53,33	319.543.145	53,33	31,95	Dinas Sosial
164	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang dilayani dan Direhabilitasi	100	31.413.183.692	95,32	11.030.875.010	100	10.833.813.022	55,06	1.509.211.629	76,63	4.819.202.229					76,63	44,48	76,63	15.850.077.239	76,63	50,46	Dinas Sosial
165	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang teenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	1.883.591.500	100	11.830.730.752	100	1.370.059.665	N/A	4.000.000	23,81	159.196.400					23,81	11,62	23,81	11.989.927.152	23,81	636,55	Dinas Sosial
166	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana yang teenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya	100	3.732.164.008	100	938.465.800	100	947.505.677	17,56	162.589.500	68	534.695.681					68	56,43	68	1.473.161.481	68	39,47	Dinas Sosial
167	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	100	569.179.250	100	1.042.599.756	100	333.747.273		54.416.000	25	146.596.000					25	43,92	25	1.189.195.756	25	208,93	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
	TENAGA KERJA																						
271	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	116.114.187.647	97,4	52.439.151.979	100	28.995.452.969	18,39	3.431.326.229	61,14	13.925.810.036					61,14	48,03	61,14	66.364.962.015	61,14	57,15	Dinas Tenaga Kerja
272	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	100	712.000.000	100	207.454.000	100	142.000.000	0	-	50	44.919.800					50	31,63	50	252.373.800	50	35,45	Dinas Tenaga Kerja
273	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Bersertifikat	100	15.998.125.000	100	5.383.870.700	100	1.553.000.000	0	-	31,67	103.555.234					31,67	6,67	31,67	5.487.425.934	31,67	34,30	Dinas Tenaga Kerja
274	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Naiklakan Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Penempatan	100	4.713.177.600	97,22	1.791.414.925	100	900.000.000	11,39	126.084.000	52,5	279.471.700					52,5	31,05	52,5	2.070.886.625	52,5	43,94	Dinas Tenaga Kerja
275	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100	2.860.000.000	98,33	867.029.000	100	394.806.000	13,56	61.269.100	44,44	143.460.630					44,44	36,34	44,44	1.010.489.630	44,44	35,33	Dinas Tenaga Kerja
276	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Norma Kerja Dan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Perusahaan	100	3.325.000.000	92,83	855.968.370	100	520.000.000	17	88.839.500	35	128.789.500					35	24,77	35	984.757.870	35	29,62	Dinas Tenaga Kerja
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
281	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100	49.021.112.900	100	23.178.909.999	100	12.004.522.881	24,48	1.571.597.412	46,11	5.591.964.532					46,11	46,58	46,11	28.770.874.531	46,11	35,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
282	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	100	1.844.345.000	100	1.180.099.055	100	987.955.000	10,2	119.278.000	17,01	321.199.000					17,01	32,51	17,01	1.501.298.055	17,01	60,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
283	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	100	3.686.183.000	83,33	2.472.852.793	100	1.010.840.000	4,44	139.503.095	5,56	362.288.122					5,56	35,84	5,56	2.835.140.915	5,56	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
									K	A	K	A	K	A	K	A							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
284	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	100	2.199.934.400	100	1.098.194.236	100	485.780.000		66.305.600		101.524.200					20,90		1.199.718.436	0	28,47		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
285	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	100	1.957.093.200	100	882.548.550	100	241.243.000		58.019.400		62.000.400					25,70		944.548.950	0	29,98		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
286	PROGRAM PEMEMPUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100	2.594.532.000	100	1.324.366.850	100	617.634.000		101.347.700		191.386.550					30,99		1.515.753.400	0	39,55		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
287	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	100	541.098.000	100	400.983.000	100	249.182.000		46.399.500		88.134.500					35,37		489.117.500	0	73,56		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum teenuhi (Unmmet Need)	8	318.652.000	15,83	90.000.000	15	61.038.000								16			90.000.000		28,24		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	100	481.302.000	100	139.157.000	100	71.918.000				50.491.000				70,21			189.648.000	0	39,40		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2144	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	986.086.000	100	484.406.000	100	265.888.000		48.988.000		121.858.800				45,83			606.264.800	0	44,30		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PANGAN																							
292	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase terkelolanya Sumber Daya Ekonomi untuk keaulatan dan kemandirian pangan	100	27.888.513.500		331.514.050	100	227.687.500		25.282.500	45	64.852.500				45	28,48	45	396.366.550	45	1,42		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
293	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100	9.474.600.000		4.465.551.996	100	3.144.522.100		252.001.650	30	513.459.800				30	16,33	30	4.979.011.796	30	52,55		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
294	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan penanganan kerawanan pangan	100	949.200.000		397.638.000	100	300.000.000		27.980.000	30	84.640.000				30	28,21	30	482.278.000	30	50,81		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
295	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tingkat pengawasan keamanan pangan segar yang diuji	100	2.629.369.600		1.947.063.800	100	1.222.440.000	20	480.267.200	35	304.623.523				35	24,92	35	2.251.687.323	35	85,64		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3271	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi	100	202.237.045.810		91.184.593.844	100	50.239.388.415	25	13.875.356.905	50	22.767.440.335				50	45,32	50	113.952.034.179	50	56,35		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV									
									K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A		K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A		
	LINGKUNGAN HIDUP																							
2111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	67.663.790.827	95,88	15.379.549.083	100	15.173.444.773	9,38	1.444.981.732	15,41	1.509.996.932					15,41	9,95	15,41	16.889.546.015	15,41	24,96	Dinas Lingkungan Hidup	
2112	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup kabupaten/kota yang terverifikasi dan tervalidasi (%)	100	2.115.823.000	100	631.298.000	100	1.306.481.000				144.579.800						11,07		775.877.800	0	36,67	Dinas Lingkungan Hidup	
2113	PROGRAM PENGEND ALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	14.526.163.000	100	199.701.000	100	389.773.000				120.157.665						30,83		319.858.665	0	2,20	Dinas Lingkungan Hidup	
2114	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	200.000.000			100	50.000.000				32.460.000						64,92		32.460.000	0	16,23	Dinas Lingkungan Hidup	
2115	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Capaian Kinerja Limbah B3	100	1.417.251.900	100	8.029.900	100	296.136.900				39.266.900						13,26		47.296.800	0	3,34	Dinas Lingkungan Hidup	
2116	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	1.828.393.400	100	67.897.900	100	160.078.000				42.244.200						26,39		110.142.100	0	6,02	Dinas Lingkungan Hidup	
2117	PROGRAM PENGAKUIAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100	365.218.000	100	10.600.000	100	36.191.000				2.715.400						7,50		13.315.400	0	3,65	Dinas Lingkungan Hidup	
2118	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	180.000.000			100	50.000.000				7.852.400						15,70		7.852.400	0	4,36	Dinas Lingkungan Hidup	
2119	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	645.766.600	73,33333	24.400.000	100	81.219.000				70.024.600						86,22		94.424.600	0	14,62	Dinas Lingkungan Hidup	
21110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	548.125.600	100	2.000.000	100	53.569.000				15.220.000						28,41		17.220.000	0	3,14	Dinas Lingkungan Hidup	
21111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	100	3.581.246.800	100	897.765.340	100	1.182.511.000				63.238.034						5,35		961.003.374	0	26,83	Dinas Lingkungan Hidup	
	BPPD																							
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	11.066.784.878	100	10.767.927.564	100	10.003.447.578	20,66	1.361.253.950	31,67	4.551.451.797						31,67	45,50	31,67	15.319.379.361	31,67	138,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
153	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100	22.581.249.432	96	19.911.703.044	100	22.494.870.100		175.284.800	8,04	1.056.880.200					8,04	4,70	8,04	20.968.583.244	8,04	92,86	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						
2121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provins	100	36.954.102.363	53,20	14.973.099.938	100	7.752.408.425	12,6	770.348.863	41,57	2.613.535.545					41,57	33,71	41,57	17.586.635.483	41,57	47,59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2122	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	638.071.000	50	129.538.477	100	93.900.000	11,76	25.046.400	46,67	30.402.400					46,67	32,38	46,67	159.940.877	46,67	25,07	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2123	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	806.447.000	50	211.135.700	100	129.556.000	43,75	43.566.200	65,56	47.236.200					65,56	36,46	65,56	258.371.900	65,56	32,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2124	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100	949.552.000	88,24	268.863.588	100	159.261.000	0	-	10	19.621.191					10	12,32	10	288.484.779	10	30,38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2125	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung	100	526.060.232	40	163.366.000	100	89.122.000	33,33	5.800.000	66,67	17.000.000					66,67	19,07	66,67	180.366.000	66,67	34,29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																						
2142	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum teeuhi (Unmmet Need)	100	318.652.000	100	142.593.500	100	61.038.000		10.060.000							14			142.593.500		44,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2143	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	100	481.302.000	100	481.302.000	100	71.918.000		48.988.000		10.060.000					13,99			491.362.000		102,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PERHUBUNGAN																						
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	19.276.450.000	94	34.585.867.035	100	20.151.318.644	14,9	2.019.325.638	24,66	8.283.652.142					24,66	41,11		42.869.519.177	14,9	222,39	Dinas Perhubungan
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	80	13.656.592.525	99	5.664.363.700	100	3.390.000.000	15	246.235.400	15	246.235.400					15	7,26		5.910.599.100	15	43,28	Dinas Perhubungan
2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	100	675.000.000	95	862.220.480	100	408.980.403	8,33	53.128.300	8,33	53.128.300					8,33	12,99		915.348.780	8,33	135,61	Dinas Perhubungan
2.15.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pengelolaan perkeretaapian	100	50.000.000	99	4.549.860.000	100	30.000.000		3.161.000		3.161.000					10,54			4.553.021.000		9106,04	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	70.061.892.828	100	32.048.067.988	100	19.373.931.708	15,78	3.380.064.733	35,59	8.370.617.329					35,59	43,21	35,59	40.418.685.317	35,59	57,69	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan	100	48.112.207.570	80	37.763.932.241	90	19.015.225.489	5,56	1.738.201.000	24,07	9.278.714.100					24,07	48,80	24,07	47.042.646.341	24,07	97,78	Dinas Komunikasi,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi Publik di Pemerintah Provinsi Lampung																					Informatika dan Statistik
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung	100	47.139.602.658	80	24.193.060.552	90	12.760.554.200	3,93	1.954.645.020	31,4	4.851.109.238					31,4	38,02	31,4	29.044.169.790	31,4	61,61	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																						
2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase teenuhnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah di OPD	100	810.760.800	100	24.010.200.583	100	12.457.151.534	17,97	1.320.337.991	50	5.990.842.615					50,00	10,60	50	30.001.043.198	50	3700,36	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46,70	2.902.460.000	37,79	1.251.943.000	100	400.000.000	37,79	31.035.000	37,79	270.164.500					37,79	7,76	37,79	1.522.107.500	37,79	44,2031	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	47,17	775.599.000	36,96	240.283.400	100	250.000.000	31,67		36,96	85.788.287					36,96	34,32	36,96	326.071.687	36,96	30,9804	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	78,57	533.039.000	61,63	161.735.570	100	150.000.000			61,63	49.408.000					61,63	32,94	61,63	211.143.570	61,63	30,3422	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	26,55	10.491.660.000	31,01	5.417.367.650	100	3.733.439.000	25,41	11.721.900	31	1.461.520.600					31,00	0,31	31	6.878.888.250	31	51,7467	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan dan perlindungan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	28,58	1.519.336.000	14,23	1.031.530.800	100	400.000.000	14,23	61.900.600	14,23	188.418.600					14,23	15,48	14,23	1.219.949.400	14,23	71,9677	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0,50	4.912.835.000	0,48	3.311.191.697	100	1.800.000.000	0,48	123.230.000	0,48	504.464.000					0,48	6,85	0,48	3.815.655.697	0,48	69,9071	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	10,91	1.565.503.000	7,09	788.606.000	100	600.000.000	7,09		7,09	108.151.100					7,09	18,03	7,09	896.757.100	7,09	50,374	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																						
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat waktu	100	36.217.647.685	99,35	119.552.808.304	100	19.730.279.893	3,47	43.306.300	38,81	8.947.002.042					3,47	45,35	38,81	128.499.810.346	38,81	330,215	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEREMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan	100	4.903.739.100	97,75	15.401.400.900	100	6.648.918.000			49,58	1.398.366.100					49,58	21,03	49,58	16.799.767.000	49,58	314,075	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
									1	2	3	4		5		6		7		8		9	
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berestasi dan Berdaya Saing	100	22.674.912.000	95,97	51.950.559.953	100	31.449.912.000			31,14	12.665.100.900					31,14	40,27	31,14	64.615.660.853	31,14	229,11	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	100	150.000.000	100	188.461.000	100	2.208.385.000			100	1.239.235.000					100,00	56,11	100	1.427.696.000	100	125,64	Dinas Pemuda dan Olahraga
STATISTIK																							
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Provinsi Lampung	95	747.911.000	80	282.839.608	90	286.497.000			11,11	17.500.000					12,34	6,11	11,11	300.339.608	11,11	40,16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PERSANDIAN																							
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi	40	1.447.121.500	30	409.910.687	35	269.233.300	12,5	9.683.100	35,09	47.153.200					35,09	17,51	35,09	457.063.887	31,25	31,58	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
KEBUDAYAAN																							
2222	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia kebudayaan yang dibina	92	8.275.998.000	98	4.046.768.230.00	100	2.200.000.000			16,67	653.928.530					16,67	29,72		4.700.696.760		56,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2223	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan	76,9	4.516.608.000	33	2.389.480.150.00	100	615.000.000				61.162.300						9,95		2.450.642.450		54,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2224	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Warisan Seni Dan Budaya Yang Tersertifikasi Nasional (WBTB)	100	1.020.321.600	100	515.839.100.00	100	400.000.000				250.352.301					62,59			766.191.401		75,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2225	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia kebudayaan yang dibina	100	1.380.200.000	73,65	293.046.000.00	100	350.000.000	50	340.000.000		109.749.500					50	31,36	50	402.795.500	50	29,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2226	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	100	11.953.374.000.00	58,90	6.938.847.561.00	100	3.900.000.000		88.591.600		933.076.500						23,93		7.871.924.061		65,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PEUSTAKAAN																							
2231	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100	16.145.492.000	100	25.413.354.287	100	13.093.429.966	21,7	1.661.196.096	56,64	6.529.600.023					56,64	49,87	56,64	31.942.954.310	56,64	197,84	Dinas Peustakaan dan Kearsipan
2232	PROGRAM PEMBINAAN PEUSTAKAAN	Persentase SDM Pengelola Peustakaan dan Unit peustakaan yang dibina	40	1.903.076.000	20	2.937.302.395	100	1.567.378.000	0,08	200.336.420	50,85	574.729.000					50,85	36,67	50,85	3.512.031.395	127,13	184,54	Dinas Peustakaan dan Kearsipan
2233	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah jenis Koleksi Naskah Kuno dan Naskah Nasional yang dilestarikan	10	625.000.000	10	298.971.100	100	232.622.000	4	8.392.200	27	65.739.400					27	28,26	27	364.710.500	270	58,35	Dinas Peustakaan dan Kearsipan
KEARSIPAN																							
2242	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang terlihat	100	1.120.000.000	250	928.212.207	100	1.050.000.000	18,61	142.078.600	49	401.691.850					49	38,26	49	1.329.904.057	49	118,74	Dinas Peustakaan dan Kearsipan
LAYANAN URUSAN PILIHAN																							
PARIWISATA																							
3261	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	26.151.158.047	85%	11.105.756.967	100	13.533.607.037	6,78	1.376.481.369	18,79	6.138.209.263					18,79	45,36	18,79	17.243.966.230	18,79	65,94	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3262	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Presentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	100	4.084.030.000	85%	4.821.993.750	100	2.650.000.000		2.693.200	3,17	214.118.200					3,17	8,08	3,17	5.036.111.950	3,17	123,31	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
			1	2	3	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	14	
	TARIK DESTINASI PARIWISATA																						
3263	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	100	2.244.904.956	85%	2.360.261.600	100	2.256.148.000		7.243.600	19,64	646.620.400					19,64	28,66	19,64	3.006.882.000	19,64	133,94	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3264	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	100	1.147.506.000	85%	1.791.756.400	100	1.357.419.000			5	131.255.000					5	9,67	5	1.923.011.400	5	167,58	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3265	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	100	718.013.587	85%	1.157.526.800	100	11.225.000.000			51,37	6.396.704.800					51,4	56,99	51,37	7.554.231.600	51,37	1052,10	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	PERTANIAN (TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN)																						
3272	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan sarana pertanian		27.888.513.500		20.253.931.787	100	9.143.167.700		471.641.000	35	1.490.914.700					35,0	16,31	35	21.744.846.487	35	77,97	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3273	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		80.651.459.100		35.939.807.535	100	33.362.024.639	25	719.525.297	30	3.981.928.437					30	11,94	30	39.921.735.972	30	49,50	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3275	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PersentasePeningkatan UpayaPengendalian DanPenanggulanganBencana Pertanian		2.629.369.600		878.489.625		1.188.556.300		403.427.700	35	478.087.350					35	40,22	35	1.356.576.975	35	51,59	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3277	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pesentase pelaksanaan penyuluhan pertanian		16.866.750.000		6.260.338.557	25	3.760.442.000	25,0	263.876.000	50	810.668.352					50	21,56	50	7.071.006.909	50	41,92	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang urusan urusan Pemerintah Daerah (%)	100	20.623.604.443	308	15.508.760.353	100	18.702.160.062	17,36	1.420.216.919	44,05	7.129.603.816					44,05	38,12	44,05	22.638.364.169	44,05	82,09	Dinas Perkebunan
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Peredaran Benih Bermutu dan Sarana Pertanian Peratanian (%)	5	1.300.000.000	40	319.385.500	100	900.000.000			6,25	100.725.300					6,25	11,19	6,25	420.110.800		24,57	Dinas Perkebunan
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan (%)	3	10.720.000.000	113	7.495.826.414	100	4.817.960.000				300.570.394						6,24		7.796.396.808		69,92	Dinas Perkebunan
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit (%)	25	950.000.000	2	245.435.000	100	375.000.000				47.784.000						12,74		293.219.000		25,84	Dinas Perkebunan
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penilaian Usaha Perkebunan (%)	30	400.000.000	2	231.721.350	100	350.000.000				33.655.400						9,62		265.376.750		57,93	Dinas Perkebunan
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Mutu Produk Perkebunan (%)	20	3.418.617.500	21	3.432.790.800	100	4.851.100.650				610.850.250						12,59		4.043.641.050		100,00	Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100	77.207.887.367	25	17.506.834.195	100	20.521.638.701	12,79	2.097.442.221	31,19	9.465.535.234					31,19	46,12	31,19	26.972.369.429	31,19	34,93	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penataan Sarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100	41.505.645.873	25	6.969.824.894	100	13.834.298.500		202.433.100	8,33	799.812.909					8,33	5,78	8,33	7.769.637.803	8,33	18,72	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penataan Prasarana Peternakan Yang Sesuai Standar	100	16.857.214.000	25	1.717.545.196	100	1.643.900.000		47.450.900	25	87.777.900					25	5,34	25	1.805.323.096	25	10,71	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100	5.601.672.400	25	609.593.600	100	1.347.658.242		61.327.300	11,33	202.172.700					11,33	15,00	11,33	811.766.300	11,33	14,49	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.6	PROGRAM PERZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase UMKM Subsektor Peternakan yang Memenuhi Standar	100	574.050.100	25	44.536.000	100	149.328.000		1.505.600		1.505.600						1,01		46.041.600	0	8,02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak yang Mendapat Pendampingan Peternakan	100	4.066.207.500	25	378.842.280	100	566.368.000		28.531.300	5	108.656.300					5	19,18	5	487.498.580	5	11,99	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
KEHUTANAN																							
3281	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	270.654.894.420	96,82	60.799.928.405	100	65.951.612.470	4,51	7.368.958.261	7,19	29.415.600.749					7,19	44,60	7,19	90.215.529.154	1,12	33,33	Dinas Kehutanan
3283	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Tutupan Lahan	104.106	33.047.764.500	538	7.994.025.821	100	3.917.395.000	1,04	12.354.600		362.185.820					1,04	9,25		8.356.211.641	0	25,29	Dinas Kehutanan
3284	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas areal yang telah dipulihkan	192	8.527.906.300	37	1.049.769.986	100	687.122.000	1,25	74.779.000		138.043.000					1,25	20,09		1.187.812.986	0,65	13,93	Dinas Kehutanan
3285	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	25	29.771.865.700	5	3.383.538.359	100	1.544.570.082	6,35	109.994.400		269.535.800					6,35	17,45		3.653.074.159	25,39	12,27	Dinas Kehutanan
3286	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	100	3.627.773.425	25	318.101.875	100	215.988.000	8,33	3.886.800		62.282.811					8,33	28,84		380.384.686		10,49	Dinas Kehutanan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																							
3291	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	100	17.550.000.150	25,75	16.296.555.905	100	16.885.872.158	11,53	2.037.327.685	30,91	8.114.602.216					30,91	48,06	30,91	24.411.158.121	30,91	139,09	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3292	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Geologi	100	1.070.000.000	100	649.795.612	100	600.000.000	15	17.913.000	35	174.080.800					35	29,01	35	823.876.412	35,00	77,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3293	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	100	750.000.000	100	255.243.000	100	519.110.000	18,18	60.854.000	27,27	123.190.500					27,27	23,73	27,27	378.433.500	27,27	50,46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3295	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah	100	3.025.000.000	100	1.904.848.669	100	1.659.790.000	20,83	301.186.000	33,33	528.600.800					33,33	31,85	33,33	2.433.449.469	33,33	80,44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
			1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
3296	PROGRAM PENGELOLAAN KETEN AGALISTRI KAN	Persentase Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terrealisasi	100	2.264.710.000	100	1.322.367.843	100	1.174.210.000	8,17	153.974.705	37,58	481.930.535					37,58	41,04	37,58	1.804.298.378	37,58	79,67	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PERDAGANGAN																							
3301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	20.048.745.539	100	15.490.154.104	100	20.257.566.549	9,89	1.974.056.093	19,28	8.240.694.655					9,89	40,68		23.730.848.759	9,89	118,37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan transaksi dalam pasar lelang	25	215.000.000	-	-	100	70.000.000	-	-										-			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3304	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwaktu	5	520.000.000	5	564.602.000	100	380.000.000		12.000.000	2	177.537.950					2	46,72		742.139.950		142,72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Produk Unggulan yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	10	400.000.000	10	458.000.000	100	1.200.000.000	14,29	67.000.000	1	132.800.000					14,29	11,07		590.800.000	14,29	147,70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3306	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Cakupan Barang beredar yang diawasi	20	1.045.000.000	20	1.006.195.400	100	1.213.000.000	8,56	101.932.310	3	212.914.357					8,56	17,55		1.219.109.757	8,56	116,66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3307	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM /PKM unggulan/Potensi yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10	1.250.000.000	10	1.638.159.730	100	500.000.000	8,33	36.395.000	3	149.320.000					8,33	29,86		1.787.479.730	8,33	143,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERINDUSTRIAN																							
3312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri di Provinsi	100	6.660.000.000	200	6.591.093.082	100	7.392.412.530		67.160.900	0,05	675.899.590					0,05	9,14	0,05	7.266.992.672	0,05	109,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3313	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	260.000.000	25	224.940.220	100	175.000.000		25.147.000	6	49.436.906					6	28,25	6	274.377.126	6	105,53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3314	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan industri kab/kota yang masuk SINAS	100	165.000.000	45	47.000.000	100	80.000.000			15						15	0,00	15	47.000.000	15	28,48	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjangpemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100	22.902.531.181	60	31.980.730.299	100	31.925.644.509	14,53	1.525.277.439	22,25	5.633.643.939					22,25	17,65	22,25	37.614.374.238	22,25	146,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	100	240.000.000	60	244.645.300	75	140.000.000									0	0,00	0	244.645.300	0	101,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	100	1.200.000.000	60	3.849.368.306	100	1.200.000.000	5,44	105.025.000	38	263.839.200					38	21,99	38	4.113.207.506	38	329,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	100	3.047.789.500	60	208.611.200	100	1.390.000.000	6,67	13.986.100	40	218.946.100					40	15,75	40	427.557.300	40	7,30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022	Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)	Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV			11		12			13			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
	MASYARAKAT HUKUM ADAT																						
3.32.2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	100	206.134.200	60	261.560.000	100	550.000.000		5.876.600					0	1,07	0	267.436.600	0	126,89			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	100	208.060.000	60	341.480.460	100	150.000.000		3.368.000					0	2,25	0	344.848.460	0	164,13			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
3.32.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	100	200.194.530	60	4.788.953.435	100	150.000.000		5.840.000					0	3,89	0	4.794.793.435	0	2395,1			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
3251	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	94.071.239.000	100	36.394.143.978	100	21.413.295.517	3,41	2.382.264.197	25,63	9.114.585.494			25,63	42,57	25,63	45.508.729.472	25,63	48,38			Dinas Kelautan dan Perikanan
3252	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)	100	6.225.279.000	100	2.672.154.988	100	1.275.000.000	0,92	38.248.600	25	330.881.685			25	25,95	25	3.003.036.673	25	48,24			Dinas Kelautan dan Perikanan
3253	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	184186	42.303.877.000	159618,9	25.281.950.612	167441,57	14.016.662.200	30530,41	186.792.750	48530,41	953.844.833			28,98	6,81	28,98	26.235.795.445	28,98	62,02			Dinas Kelautan dan Perikanan
3254	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	206995	26.125.000.000	171054,3	16.828.442.445	187442,89	4.687.858.000	37656,53	236.756.150	40404,28	809.265.900			21,56	17,26	21,56	17.637.708.345	21,56	67,51			Dinas Kelautan dan Perikanan
3255	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	100	9.500.000.000	100	1.972.134.021		1.936.000.000	7,74	127.504.700		316.953.589			0	16,37		2.289.087.610	0	24,10			Dinas Kelautan dan Perikanan
3256	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Ekspor Perikanan (kg)	2E+07	12.805.000.000	20525480	4.822.229.506	20725,37	2.895.000.000		172.344.600	7860,85	156.862.600			37,93	5,42	37,93	4.979.092.106	37,93	38,88			Dinas Kelautan dan Perikanan
	PENUNJANG URUSAN																						
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																						
511	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	65.165.361.946	100	28.987.580.920	100	30.025.478.008	14,84	2.425.843.342	34,04	9.776.932.407			34,04	32,56	34,04	38.764.513.327	100	59,49			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
512	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100	17.662.188.551	100	2.875.422.600	100	3.253.526.884	8,33	218.724.100	31,55	670.458.900			31,55	20,61	31,55	3.545.881.500	100	20,08			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
513	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100	23.185.808.566	100	4.078.790.100	100	3.549.702.426	2,5	183.558.800	43,33	465.697.000			43,33	13,12	43,33	4.544.487.100	100	19,60			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	KEUANGAN																						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
			1	2	3	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	
521	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	442.798.458.953	100	99.100.768.332	100	102.667.200.199	9,43	21.261.160.332	14,14	47.613.265.038					14,14	46,38	14,14	490.411.723.991	14,14	110,753	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
522	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan Persentase Tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota	100	6.059.779.152.977	100	1.374.970.250.316	100	1.504.536.329.575	409.507.082.285	8,03	607.457.177.831					8,03	40,38	8,03	6.667.236.330.808	8,03	110,024	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
523	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang mengelola aset barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	100	2.817.332.982	100	6.153.965.728	100	6.913.542.200	578.722.757	1,54	1.833.621.360					1,54	26,52	1,54	4.650.954.342	1,54	165,084	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	452.908.852.053	100	200.208.841.563	100	122.321.971.064	21,04	26.110.312.103	41,13	57.481.496.501					41,13	46,99	41,13	510.390.348.554	41,13	112,692	Badan Pendapatan Daerah
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	100	76.307.609.500	100	26.229.545.125	100	16.685.667.800	27,21	119.592.000	31,5	4.984.809.869					31,5	29,87	31,5	81.292.419.369	31,5	106,533	Badan Pendapatan Daerah
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																						
531	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	59.648.317.050	100	28.694.882.882	100	16.091.865.780	12,49	377.482.848	43,14	7.869.094.694					43,14	48,90	43,14	36.563.977.576	43,14	0,63	Badan Kepegawaian Daerah
532	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Peningkatan pelayanan administrasi Kepegawaian	100	39.692.304.572	95,29	14.546.516.118	100	7.689.668.885	24,74	389.473.000	44,43	2.408.405.716					44,43	31,32	44,43	16.954.921.834	44,43	0,98	Badan Kepegawaian Daerah
541	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	800.897.077.239	100	40.597.902.123	100	20.159.293.058	15,98	2.141.638.455	41,08	9.483.596.587					41,08	47,04	41,08	50.081.498.710	41,08	6,25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
542	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang ditingkatkan	100	59.329.929.600	89,44	22.786.687.397	100	10.262.693.600	8,28	223.715.300	26,33	644.426.451					26,33	6,28	26,33	23.431.113.848	26,33	39,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
551	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	40.919.346.746	44,96	18.399.113.416	100	9.647.743.351	34,69	1.407.322.918	47,44	4.982.051.865					47,44	51,64	47,44	23.381.165.281	47,44	57,14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
552	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah rumusan kebijakan program penelitian dan pengembangan daerah	100	12.019.918.927	31,63	3.801.645.350	100	2.179.361.484	12,5	150.215.400	4,58	570.408.500					4,58	26,17	4,58	4.372.053.850	4,58	24,89	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PENGAWASAN																						
611	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	133.987.983.208	85,82	33.239.927.295	100	37.075.727.468	23,48	2.713.688.874	37,41	23.515.637.926					37,41	63,43	37,41	56.755.565.221	37,41	42,36	Inspektorat
612	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	88	31.914.610.000	78,12	5.466.037.172		6.366.415.000	254.374.500	1.175.073.234						0	18,46		6.641.110.406	0	20,81	Inspektorat	
613	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPIP Perangkat Daerah	3,10	4.392.198.000	3,12	722.483.196		1.042.162.000	67.365.700	17,71	141.010.100					17,71	13,53	17,71	863.493.296	17,71	19,66	Inspektorat	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	
	SEKRETARIAT DEWAN																						
421	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Layanan Administrasi Umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	100	240.946.033.265	94,44	160.061.626.334	100	162.075.757.712	11,35	23.562.220.647	50,81	68.466.688.408					50,81	42,24	50,81	228.528.314.742	11,35	94,85	Sekretariat DPRD
422	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	321.052.419.919	96,43	222.528.637.259	100	190.200.945.888	25,62	43.130.228.410	56,61	106.499.247.176					56,61	55,99	56,61	329.027.884.435	25,62	102,48	Sekretariat DPRD
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dan Persentase Sengketa Hukum yang di Fasilitasi	100	6.964.535.600	100	1.589.036.926	100	1.773.440.600	25,68	369.000.000	25,68	273.576.308					25,68	15,43	25,68	1.862.613.234	25,68	26,74	Biro Hukum
415	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100	6.076.936.080	100	1.343.188.291	100	1.776.559.400	23,9	164.300.000	23,9	86.947.234					23,9	4,89	23,9	1.430.135.525	25,68	23,53	Biro Hukum
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																						
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.964.834.103	97,3	1.485.044.945	100	1.796.472.100	20,63	182.804.200	32,55	459.685.342					32,55	25,59	32,55	1.944.730.287	32,55	98,98	Biro Organisasi
412	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Dokumen Penataan Organisasi (Kelembagaan, Anjab, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tataaksana dan Pelayanan Publik) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	1.575.000.000	100	1.303.396.525	100	2.003.527.900	8,33	117.195.500	38	342.598.100					38	17,10	38	1.645.994.625	38	104,51	Biro Organisasi
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi		3.098.353.700		1.753.245.218	100	1.168.609.000	17,27	186.653.800	34,23	470.675.300					34,23	40,28	34,23	2.223.920.518	34,23	6,02	Biro Kesejahteraan Rakyat
414	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan		177.843.024.939		68.862.920.898	100	92.822.200.028	5,56	1.685.368.282	21,02	851.132.520.386					21,02	916,95	21,02	919.995.441.284	21,02	0,95	Biro Kesejahteraan Rakyat
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelaporan capaian kerumahaan, administrasi keuangan dan aset, serta ketatausahaan yang tepat waktu	100	664.476.426.541	100	336.292.750.363	100	159.090.384.355	26,38	18.964.817.719	49,3	68.661.997.163					49,3	43,16	49,3	404.954.747.526	49,3	2,85	Biro Umum
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang ditingkatkan	100	6.713.452.450	100	3.076.046.315	100	1.901.658.500	15,28	195.369.538	25,28	765.676.916					25,28	40,26	25,28	3.841.723.231	25,28	57,22	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
413	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Laporan Pemerintahan Daerah (LPD dan LKPI) Tepat Waktu	100	6.636.547.604	100	2.422.984.900	100	1.798.341.500	6,88	73.631.900	37,28	419.002.578					37,28	23,30	37,28	2.841.987.478	37,28	42,82	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	3.403.397.678	100	755.124.860	100	919.500.000	10,88	57.188.600	12,55	57.188.600					12,55	6,22	12,55	812.313.460	10,88	23,87	Biro Administrasi Pembangunan
418	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan yang tertib administrasi	100	9.201.000.000	100	2.440.000.000	100	2.280.500.000	7,5	129.473.400	10,85	129.473.400					10,85	5,68	10,85	2.569.473.400	10,89	27,93	Biro Administrasi Pembangunan
811	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	18.820.501.232	75	18.820.501.232	100	179.262.631.537	12,1	940.580.842	10	13.692.854.395					10	7,64	10	32.513.355.627	13,33	172,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
			K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A			
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																						
812	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30	1.278.732.000	30	1.278.732.000	100	1.940.350.600	30,28	354.933.500	12	679.482.100			40,00	35,02	12	1.958.214.100	40,00	38,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
813	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	30	601.352.900	30	601.352.900	100	1.092.819.000	2,6	15.508.980	5	167.036.530			5	15,28	5	768.389.430	16,67	27,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
814	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	208.619.000	30	208.619.000	100	258.433.000	14,76	63.165.000	20	162.059.700			20	62,71	20	370.678.700	66,67	47,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
815	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30	685.000.000	30	685.000.000	100	1.170.394.600	4,58	102.079.600	7	246.614.800			7	21,07	7	931.614.800	23,33	52,29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
816	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	30	1.424.735.000	30	1.424.735.000	100	824.509.000			8	206.652.400			8	25,06	8	1.631.387.400	26,67	31,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perencanaan Penatausahaan, Keuangan dan Kinerja serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	8.193.691.685	93	7.663.184.838	100	1.673.751.400	48,06	797.416.981	81,44	1.592.806.662			48,06	47,64		8.460.601.819	48,06	103,26	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
4.1.7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Strategi, Monitoring dan evaluasi Pengadaan barangdan Jasa (E-Katalog Lokal)	100	11.702.317.393	40	4.691.130.400	100	2.286.248.600	14,44	314.313.550	75	314.313.550			14,44	13,75		5.005.443.950	14,44	42,77	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolan dan penyajian materi dan komunikasi Pimpinan	100	28.367.411.652	100	13.645.519.509	100	6.876.923.490	20,65	524.231.918	53,27	3.691.823.363			53,27	53,68	53,27	17.337.342.872	20,65	49,95	Biro Administrasi Pimpinan		
411	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan	100	6.583.471.075	100	2.794.404.141	100	1.131.785.500	19,1	288.331.900	31,25	460.977.018			31,25	40,73	31,25	3.255.381.159	19,1	49,45	Biro Perekonomian		
416	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti	100	6.418.819.045	81	2.111.747.700	100	1.868.214.500	19,18	233.091.100	41,8	359.778.800			41,8	19,26	41,8	2.471.526.500	19,18	38,50	Biro Perekonomian		
571	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	65.506.026.832	100	32.160.180.737	100	16.852.867.837	22,80	1.855.189.068	45,44	8.027.194.970			45,44	47,63	45,44	40.187.375.707	45,44	63,41	Badan Penghubung		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja dari Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang dievaluasi (persen)		Realisasi kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Sampai dengan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV								
									1	2	3	4	5	6	7	8							
1	2	3	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A	K	A			
572	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	% tingkat kepuasan masyarakat Lampung di luar daerah terhadap pelayanan Badan Penghubung	100	6.710.285.180	100	2.085.323.050	100	1.834.014.400	6,67	172.314.200	20	475.871.400					20,00	25,95	20	2.561.194.450	20,00	38,17	Badan Penghubung
	ASPEK DAYA SAING																						
	PENANAMAN MODAL																						
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan asset, serta dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	90.756.217.259	100	34.811.410.138	100	17.252.362.620	23,16	1.870.162.393	30,89	8.700.938.010					23,16	10,84		43.512.348.148	23,16	40,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pengolahan data serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal	100	1.125.000.000	98%	893.640.050	100	440.000.000		112.188.700		226.290.050					25,5			1.119.930.100		89,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peringkat Tujuan Investasi Nasional	7	240.000.000	6	1.109.985.250	7	425.000.000	50	69.299.400		91.965.400					50	16,31		1.201.950.650		491,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian izin berusaha sesuai dengan ketentuan berlaku	100	4.720.000.000	100	1.283.995.725	100	500.000.000	28,78	146.915.400		242.199.100					16,86	29,38		1.526.194.825	16,86	30,32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi terhadap Target Nasional	100	2.500.000.000	85,11	1.150.428.000	100	801.000.000	29,48			355.559.000					16,62			1.505.987.000	16,62	46,02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang akurat	100	800.000.000	100	243.219.000	100	100.000.000		2.109.600		9.609.600					2,11			252.828.600		30,67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teadu Satu Pintu

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2022

2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s.d Triwulan II 2023.

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung T.A 2023 dilaksanakan sampai dengan Triwulan II 2023. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan dengan penelaahan dan pencermatan atas input capaian pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung dalam aplikasi Simonev dan laporan Evaluasi Renja OPD s.d. Triwulan I.

Secara umum, permasalahan yang menyangkut pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam indicator makro pembangunan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Sampai dengan Triwulan II-2023, Capaian Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung, secara umum masih terkendali. Indikasinya pada capaian Indikator makro berdasarkan data yang diperoleh, capaian Indikator Makro ter-update pada Tw-1 dan Tw-2 2023 relatif berada dalam rentang Sasaran Perubahan RKPD 2023, bahkan beberapa diantaranya telah melewati target tahunan 2023. Meskipun capaian tahunan masih akan berubah namun setidaknya capaian pertengahan tahun ini menjadi acuan dalam upaya perbaikan dan peningkatan capaian Sasaran dan target pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran.
- Terkait dengan kinerja keuangan daerah, pada komponen Belanja Pegawai mengalami penyesuaian seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi terutama untuk pemenuhan tenaga P3K sektor pendidikan dan kesehatan. Catatan penting lainnya pada sisi pengeluaran pembiayaan, adalah pada bulan Juni tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembayaran/pelunasan cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo kepada PT. Multi Sarana Infrastruktur (SMI).

- Pada sektor produksi yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya perubahan iklim akibat el Nino yang diprediksi terjadi hampir sepanjang Tahun 2023, perlu segera diantisipasi agar tidak mempengaruhi produksi komoditas pangan (sektor pertanian) sehingga stabilitas pangan akan terjaga di tingkat daerah.
- Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dokumen capaian realisasi SDGs Provinsi Lampung tahun 2022 telah disusun di Tahun 2023, dengan data-data capaian berdasarkan data yang bersumber dari BPS (Triwulan I atau Semester I 2023) serta data-data sektoral yang bersumber dari perangkat daerah. Namun untuk beberapa data capaiannya yang bersumber dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Lampung masih menggunakan data tahun 2021 karena keterbatasan penyediaan data.

Kendala lain dalam pelaksanaan SDGs tahun 2022 adalah prioritas pembangunan masih difokuskan pada penanganan pandemi Covid 19 khususnya pada sektor kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial.

- a) Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori SUDAH TERCAPAI adalah pada Pilar Ekonomi sebanyak 70,45% (31 indikator dari total 44 indikator), namun untuk pilar yang memiliki jumlah tertinggi adalah Pilar Sosial sebanyak 74 indikator dari total 110 indikator (67,27%).
- b) Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori TIDAK TERCAPAI adalah Pilar Lingkungan sebanyak 17,64% (6 indikator dari total 34 indikator), namun untuk pilar yang memiliki jumlah tertinggi adalah Pilar Sosial sebanyak 17 indikator dari total 110 indikator (15,45%).

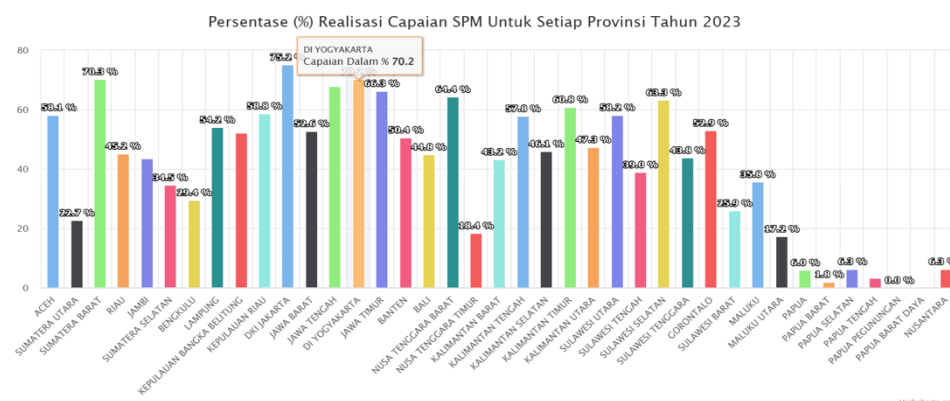
c) Terdapat kendala dalam proses pendataan realisasi TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2022 yaitu:

- Sebanyak 3 indikator (1,35%) yang BELUM TERSEDIA DATANYA yaitu pada Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum Tata Kelola Pemerintahan;
- Sebanyak 46 indikator (20,72%) yang MASIH MEMAKAI DATA REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN SEBELUMNYA dikarenakan masih belum ter-update-nya data sektoral yang sebagian besar bersumber data instansi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

d) Perlu perhatian khusus pada Pilar Sosial mengingat jumlah indikator yang TIDAK TERCAPAI sebanyak 17 indikator (15,45%) dari total 110 indikator, terlebih dengan kedudukan Pilar Sosial yang berisikan kebutuhan dasar pokok masyarakat yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, sosial untuk menunjang kelangsungan hidup masing-masing individu.

- Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sampai dengan Triwulan II-2023, capaian SPM Provinsi Lampung rata-rata 6 bidang sebesar 54,2%.



Sumber : Kemendagri 2023



Beberapa kendala atau hambatan yang ditemui berdasarkan hasil evaluasi capaian SPM Sampai dengan Triwulan II-2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Proses Pembangunan SPAM dan SPALD Lintas Kabupaten/Kota (Regional) ini merupakan kesatuan rangkaian yang panjang baik secara teknis maupun non teknis yang membutuhkan anggaran besar serta kebijakan, seperti kesepakatan dan kerjasama kab/kota yang terlibat dalam infrastruktur Regional. Sehingga Proses pembangunan ini membutuhkan waktu yang panjang. SPAM dan SPALD Lintas Kabupaten/Kota (Regional) masih dalam Penyusunan Readiness Criteria (RC)
- Pemenuhan Target SPM Lintas Kab/Kota (Regional) masih dalam perencanaan.

Hasil telaahan dan pencermatan terhadap hasil capaian kinerja samapai dengan triwulan II-2023 secara teknis juga menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian satuan indikator output, baik antar dokumen perencanaan, maupun dalam dokumen perencanaan yang sama namun dalam periode yang berbeda. Kondisi ini menjadikan capaian kinerja kegiatan yang ditampilkan dalam aplikasi tidak mencerminkan capaian yang sesungguhnya.
2. Adanya keterlambatan pada proses input data ke dalam aplikasi Simonev yang dilakukan oleh operator pada Perangkat Daerah.
3. Pada beberapa Perangkat Daerah sering terjadi penggantian operator yang bertugas melakukan input data pada aplikasi Simonev serta pengisian aplikasi perencanaan yang lain. Hal ini cukup mempengaruhi ketepatan dan kecepatan waktu dalam input data, termasuk validitas data yang diinput.
4. Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi serta pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran di beberapa Perangkat Daerah.

- 
5. Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Operasional Kinerja yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan di Perangkat Daerah seringkali terabaikan akibat masalah internal maupun eksternal.
 6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
 7. Belum tersedianya data *ter-update* s.d. Tw II 2023 terutama pada sebagian Indikator Makro Provinsi (PDRB per Kapita, Kemiskinan, Rasio Gini, dll) sehingga belum dapat secara optimal menggambarkan kondisi capaian pada tengah Tahun Anggaran 2023.
 8. Belum optimalnya peran Forum Data di lingkup Pemda Provinsi sehingga belum dapat menopang kebutuhan data pembangunan (sektoral, spasial dan fiskal) dalam rangka monitoring dan evaluasi program/kegiatan.
 9. Dukungan alokasi dana Pusat (DAK/DAU) menjadi stimulus terhadap pelaksanaan dan peningkatan capaian kegiatan, namun di sisi lain sebagian kegiatan yang bersumber pada dana daerah justru mengalami pelambatan.
 10. Kepadatan kegiatan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang secara berbarengan menjadi tahun akhir dari periode perencanaan jangka panjang dan menengah, menyebabkan volume pekerjaan meningkat yang tidak sebanding dengan ketersediaan personel SDM yang kompeten.
 11. Konektivitas jaringan (digital) maupun konektivitas wilayah (akses fisik) yang belum mantap dan merata di beberapa Kabupaten/Kota menjadi sebab keterlambatan rekapitulasi data dan informasi.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

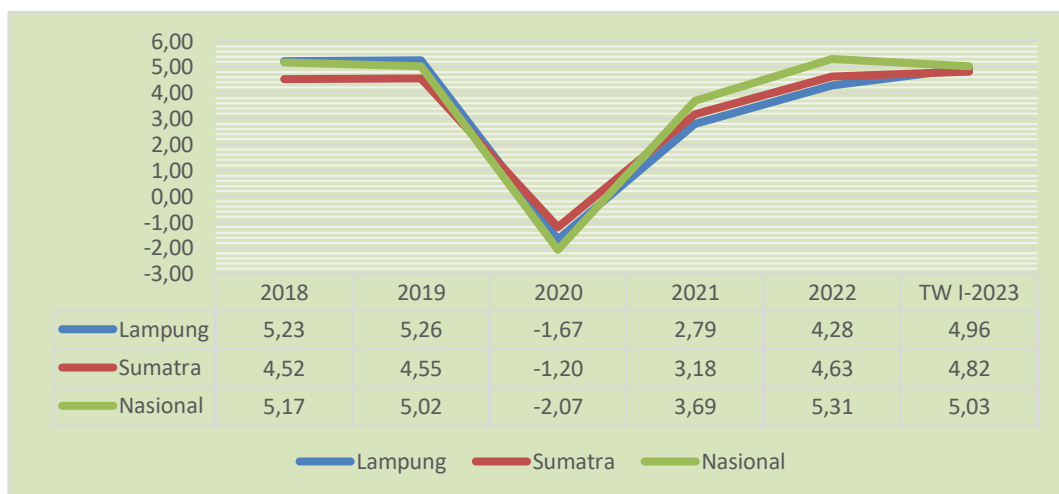
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan II-2023

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2023 bertumbuh sebesar 4,96 persen menguat dibandingkan realisasi pertumbuhan triwulan I-2022 yang hanya sebesar 2,86 persen (*y on y*). Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan 0,79 persen menguat dibanding capaian triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen. (*q to q*).

Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung pada TW I 2023, masih sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,03) dan melebihi dari rata-rata Pulau Sumatera (4,82). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2023 berdasarkan ADHB dan ADHK, masing-masing sebesar Rp. 105,59 triliun dan Rp. 63,86 triliun.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2023, diolah



Pertumbuhan positif dicapai oleh hampir seluruh lapangan usaha, terutama lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 17,03 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor serta Jasa Perusahaan juga tumbuh signifikan masing-masing mencapai 15,11 persen dan 15,01 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi terutama pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan, serta Informasi dan Komunikasi yang terkontraksi masing masing sebesar 4,86 persen dan 2,55 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh LU (lapangan usaha) utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (26,97%); diikuti Industri Pengolahan (18,17%); serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor (14,03%). Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 59,16 persen. Namun terjadi penurunan kinerja Lapangan Usaha Primer. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat mengalami kontraksi 0,75 (yoy) lebih rendah jika dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,13% (*q to q*). Kinerja LU Pertambangan dan Penggalan juga terkontraksi 1,62% walaupun membaik jika dibandingkan -2,79% pada triwulan sebelumnya (*q to q*). Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada Triwulan I 2023 tumbuh 3,32 (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,26%. Untuk menjadi perhatian, bahwa pada periode pemulihan ekonomi Tahun 2021-2022, pertumbuhan kinerja LU Industri Pengolahan rata-rata hanya sebesar 1,97% (yoy) jauh dibawah kinerjanya pada periode 2015-2020 yang tumbuh 6,99% (yoy).

Tabel 3. 1 Struktur PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha TW I 2023

No.	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.36	27.9	26.97
B	Pertambangan dan Penggalian	5.6	5.89	5.39
C	Industri Pengolahan	19.7	18.55	18.17
D	Pengadaan Listrik, Gas	0.14	0.14	0.13
E	Pengadaan Air	0.11	0.1	0.1
F	Konstruksi	9.9	9.75	9.81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.7	13.2	14.03
H	Transportasi dan Pergudangan	4.95	5.97	7.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.48	1.52	1.59
J	Informasi dan Komunikasi	4.28	3.88	3.95
K	Jasa Keuangan	2.22	2.08	2.07
L	Real Estate	2.88	2.75	2.62
M, N	Jasa Perusahaan	0.15	0.16	0.16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.57	3.24	2.97
P	Jasa Pendidikan	3.04	2.89	2.86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.08	0.99	0.98
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.85	1	1.05
PDRB		100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (*source of growth*) Provinsi Lampung triwulan I-2023 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 4,96 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,90 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,40 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,63 persen. Laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel. 3.1 berikut.

Tabel 3. 2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB TW I 2023 Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha (Persen)

KOMPONEN		PERTUMBUHAN		SUMBER PERTUMBUHAN
		Tw I-2023 terhadap Tw IV- 2022 (qtoq)	Tw I-2023 terhadap Tw I-2022 (yoy)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.13	-0.75	-0.20
B	Pertambangan dan Penggalian	-2.89	-1.62	-0.08
C	Industri Pengolahan	-0.26	3.32	0.60
D	Pengadaan Listrik, Gas	-2.96	3.25	0.01
E	Pengadaan Air	0.18	`	0.00
F	Konstruksi	-2.11	0.94	0.10
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	0.06	14.29	1.90
H	Transportasi dan Pergudangan	-1.07	25.8	1.40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.63	14.37	0.21
J	Informasi dan Komunikasi	0.01	11.95	0.63
K	Jasa Keuangan	6.09	-5	-0.11
L	Real Estate	-9.15	-0.51	-0.02
M, N	Jasa Perusahaan	-4.68	9.32	0.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos Wajib	-12.54	8.5	0.24
P	Jasa Pendidikan	-0.58	3.16	0.10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1.36	-2.94	-0.03
R,S,T, U	Jasa lainnya	-2.66	22.16	0.21
PDRB		0.79	4.96	4.96

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Dari sisi Pengeluaran, Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,12 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit

yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,90 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,88 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,01 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,83 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 8,08 persen.

Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran (Persen)

KOMPONEN		PERTUMBUHAN		SUMBER PERTUMBUHAN
		Tw I-2023 terhadap Tw IV-2022 (qtoq)	Tw I-2023 terhadap Tw I-2022 (yoy)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	0.55	4.88	3.01
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.72	6.9	0.10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-43.87	3.01	0.15
4	PMTB	-3.25	2.83	0.95
5	Perubahan Inventori	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	-6.54	10.12	4.68
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-14.21	8.08	3.94
PDRB		0.79	4.96	4.96

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2023

Struktur perekonomian Lampung dari sisi pengeluaran, pada triwulan I 2023 masih didominasi oleh 2 (dua) komponen permintaan domestik yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi (PMTB). Konsumsi RT tercatat memiliki kontribusi 63,43% terhadap PDRB Provinsi Lampung, kemudian diikuti oleh Investasi (PMTB) dengan kontribusi sebesar 32,96%. Adapun komponen permintaan domestik lainnya, yaitu Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDRB, yaitu sebesar 5,07% dan 1,70%. Dari sisi komponen eksternal, kontribusi ekspor cukup dominan terhadap PDRB Provinsi Lampung, yaitu sebesar 50,53%. Sedangkan permintaan impor Provinsi Lampung juga cukup tinggi, yaitu sebesar 54,37%

terhadap PDRB. Perkembangan struktur komponen eksternal PDRB Provinsi Lampung tersebut menyebabkan rendahnya kontribusi Net Ekspor terhadap perekonomian Lampung.

Tabel 3. 4 Struktur PDRB (ADHB) Provinsi Lampung TW I 2023 Menurut Pengeluaran (Persen)

NO.	KOMPONEN	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	61.96	61.28	63.43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.72	1.63	1.7
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.9	6.84	5.07
4	PMTB	33.81	32.45	32.96
5	Perubahan Inventori	0.22	0.26	0.68
6	Ekspor Barang dan Jasa	49.05	52.9	50.53
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	54.65	55.35	54.37
PDRB		100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022.

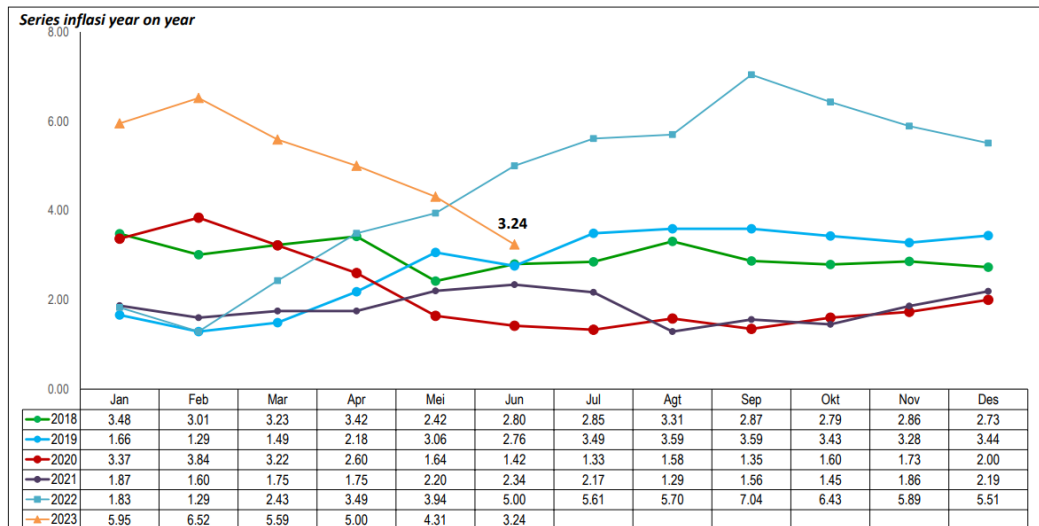
Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada TW II-2023 (Inflasi Bulan Juni 2023), sebesar 3,24 % (yoy) lebih rendah dibandingkan Bulan Juni 2022 yang sebesar 5,0%. Capaian Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahunan Nasional mengalami inflasi sebesar 3,52% (yoy).

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau 1,40 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 4,75 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga 1,58 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,53 persen; kelompok kesehatan 1,92 persen; kelompok transportasi 8,98 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 3,08 persen; kelompok pendidikan 9,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,54 persen; dan kelompok perawatan

pribadi dan jasa lainnya 3,64 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

Grafik 3. 2 Capaian Kinerja Inflasi Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Beberapa faktor penyebab peningkatan tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi, kondusifnya pandemic covid-19 yang mendorong peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat baik lintas kota/provinsi termasuk ibadah umroh. Pada Kelompok Pendidikan disumbang oleh kelompok Pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah dasar yang disebabkan penyesuaian biaya Pendidikan dan normalisasi aktivitas belajar mengajar.

Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan dari Rp. 37 juta menjadi Rp. 42 juta. Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan menurunnya aktivitas

perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan pendapatan perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp 45,10 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 71 Juta Rupiah pada tahun 2022.

Grafik 3. 3 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung dan Nasional, 2023

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung lima tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang mempunyai PDRB Perkapita tertinggi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,8 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Lampung Barat dan Mesuji masing-masing sebesar 4,10 persen dan 3,31 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Lampung, masing-masing 0,8 persen dan 1 persen. Pada Tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar (Rp. 56,12 juta),

lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung (Rp. 45,10 juta).

Tabel 3. 5 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota ADHB se-Prov Lampung

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tulang Bawang	45,09	48,37	51,07	53,69	56,12
Bandar Lampung	49,30	53,00	56,22	50,75	51,90
Lampung Tengah	48,32	52,17	55,37	48,86	50,32
Mesuji	45,09	49,01	51,93	45,81	47,41
Lampung Selatan	38,60	41,63	44,13	41,70	43,31
Tulang Bawang Barat	36,61	39,56	41,86	39,97	41,57
Lampung Utara	33,55	36,07	38,51	37,55	39,21
Metro	33,63	35,67	37,68	37,36	38,74
Lampung Timur	35,18	38,48	39,80	36,71	38,32
Pesawaran	32,11	34,43	36,43	34,05	34,97
Way Kanan	27,40	29,38	31,02	29,59	30,75
Pesisir Barat	25,88	27,86	30,25	28,89	30,06
Pringsewu	24,59	26,20	27,85	27,56	28,67
Tanggamus	22,87	24,54	26,03	24,22	25,30
Lampung Barat	20,50	22,02	23,40	23,61	24,71
Provinsi Lampung	37,00	39,86	42,17	39,35	40,95

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

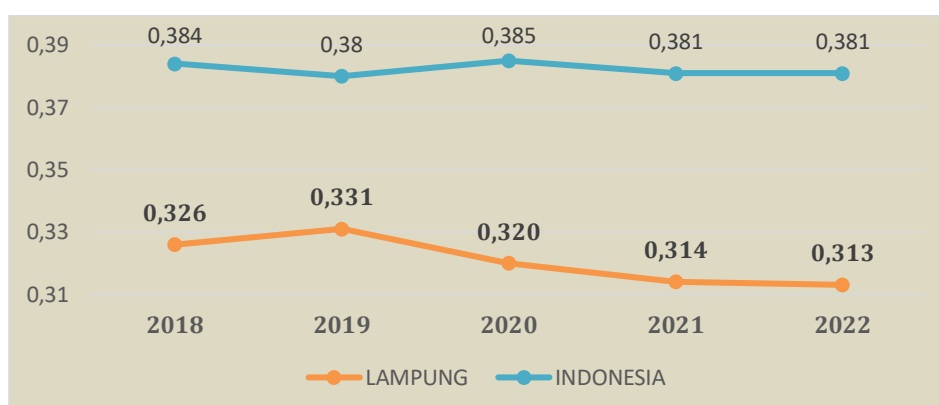
Indeks Gini

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2018 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,326 tahun 2018 menjadi 0,314 pada Maret 2022, dan menurun 0,001 poin menjadi 0,313 pada September 2022. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan pada masyarakat Provinsi Lampung. Rasio Gini Provinsi Lampung

tercatat lebih rendah dibandingkan capaian Rasio Gini Nasional yaitu sebesar 0,381 per September 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Peran kebijakan untuk mengurangi ketimpangan jauh lebih kompleks dibanding dengan mengurangi kemiskinan. Dalam mengurangi kemiskinan, langkah yang akan dilakukan pemerintah lebih jelas karena sasaran rumah tangga yang dituju teridentifikasi dengan jelas. Sementara itu, ketimpangan menyangkut populasi secara keseluruhan, baik yang kaya maupun yang miskin. Upaya mengurangi ketimpangan dapat dilakukan dengan pemerataan akses dalam hal partisipasi ekonomi serta perbaikan dalam redistribusi pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Grafik 3. 4 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung September 2022, diolah

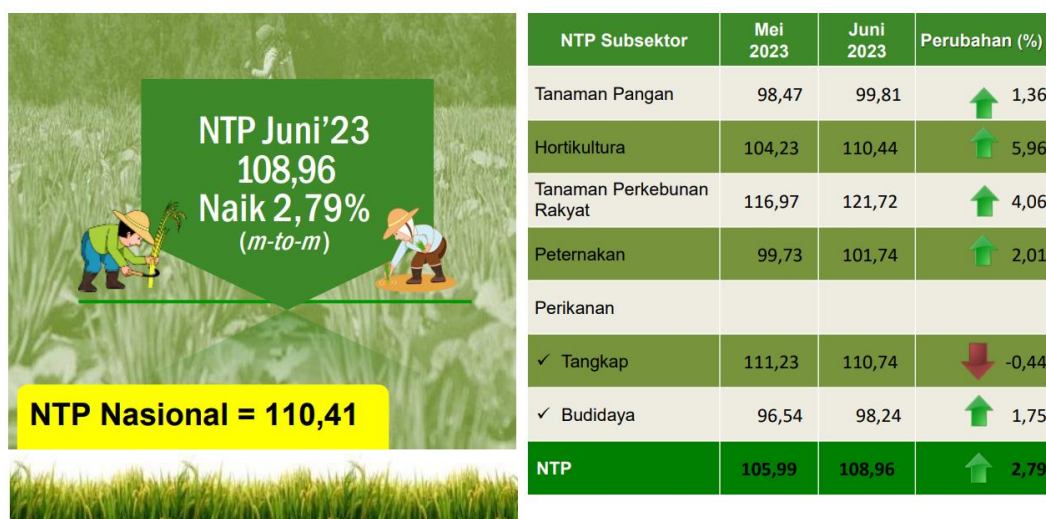
Nilai Tukar Petani

Nilai tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani dan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP merupakan indikator untuk menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Capaian NTP Provinsi Lampung sampai dengan Juni Tahun 2023 adalah sebesar 108,96, meningkat dibandingkan dengan data capaian NTP tahunan Provinsi Lampung Tahun 2022 (104,30). NTP Provinsi Lampung Juni 2023 sebesar 108,96 atau naik 2,79 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 3,21 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik sebesar 0,41 persen.

Peningkatan NTP Juni 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di beberapa subsektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,36 persen, subsektor tanaman hortikultura sebesar 5,96 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,06 persen, subsektor peternakan sebesar 2,01 persen, dan subsektor perikanan budidaya sebesar 1,75 persen. Sementara itu, NTP pada subsektor lainnya mengalami penurunan NTP yaitu subsektor perikanan tangkap sebesar 0,44 persen. Berikut capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung sampai dengan Juni Tahun 2023.

Grafik 3. 5 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Juni 2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023, diolah

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dengan Indeks Harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Secara

konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat It dibandingkan dengan indeks BPPBM.

Pada Juni 2023, NTUP Provinsi Lampung naik sebesar 3,03 persen. Peningkatan NTUP terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,54 persen; subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,28 persen; subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,40 persen; subsektor peternakan sebesar 2,13 persen; dan subsektor perikanan budidaya sebesar 1,93 persen. Sedangkan NTUP Sektor perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 0,26%. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya Provinsi Lampung, Mei-Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Grafik 3. 6 Capaian Nilai Tukar Usaha Petani Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2023

3.1.2. Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan II 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka

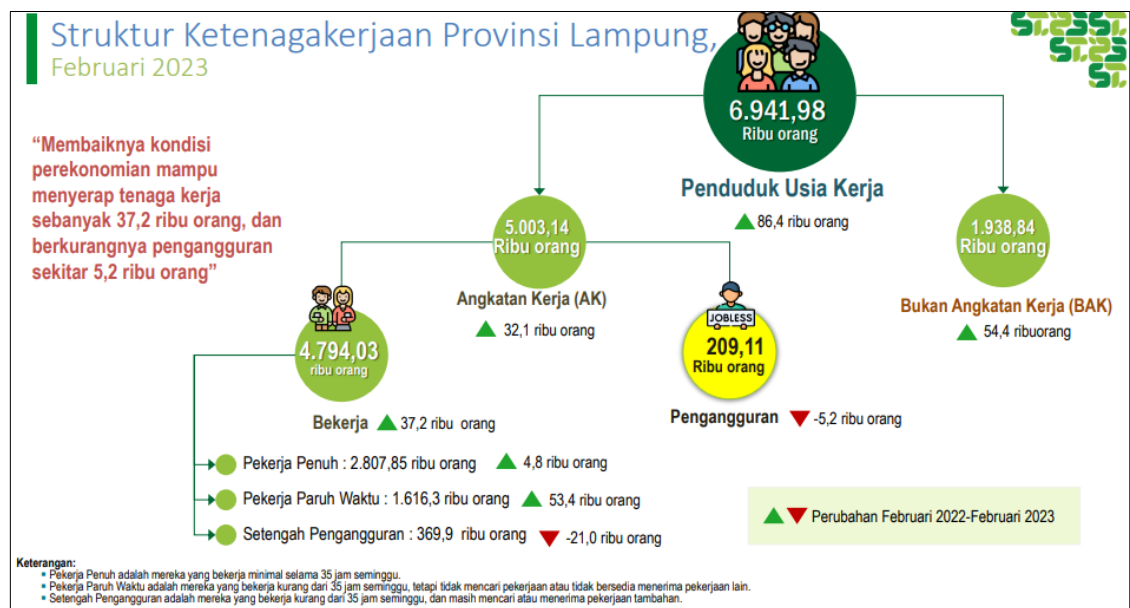
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Seiring membaiknya perekonomian di Lampung, pada periode Februari 2022 sampai dengan Februari 2023 pasar tenaga kerja mampu menyerap 37,2

ribu tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sebanyak 5,2 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada **Februari 2023 sebesar 4,18% turun dari 4,31% pada Februari 2022**.

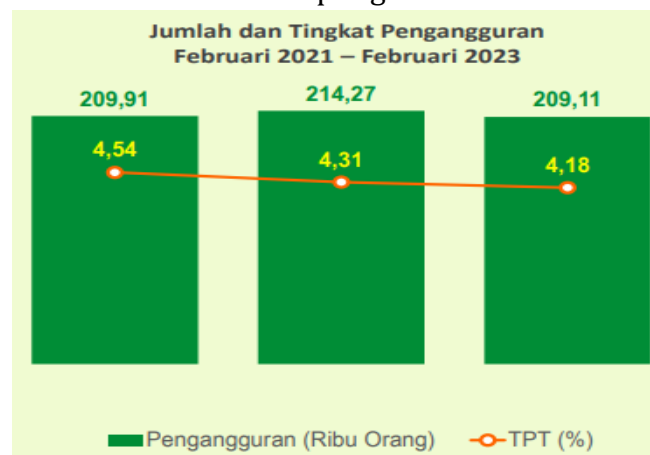
Jika dibandingkan se Wilayah Sumatera, TPT Provinsi Lampung terendah ke-3 setelah Bengkulu (3,21%) dan Bangka Belitung (3,89%). TPT tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (7,61%).

Grafik 3. 7 Struktur Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Grafik 3. 8 Tingkat Pengangguran Februari 2022 – Februari 2023 Provinsi Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Pada periode 2016-2019, TPT di Provinsi Lampung selalu menurun dari 4,62 persen menjadi 4,03 persen di Tahun 2019. Namun sejak Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung meningkat menjadi 4,67 dan terus meningkat menjadi 4,69 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,52. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

Pada Agustus 2022, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin, hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Agustus 2021. Secara nasional, selama periode 2016-2022, capaian TPT Provinsi Lampung selalu lebih baik dibandingkan TPT Nasional (5,86) pada Tahun 2022.

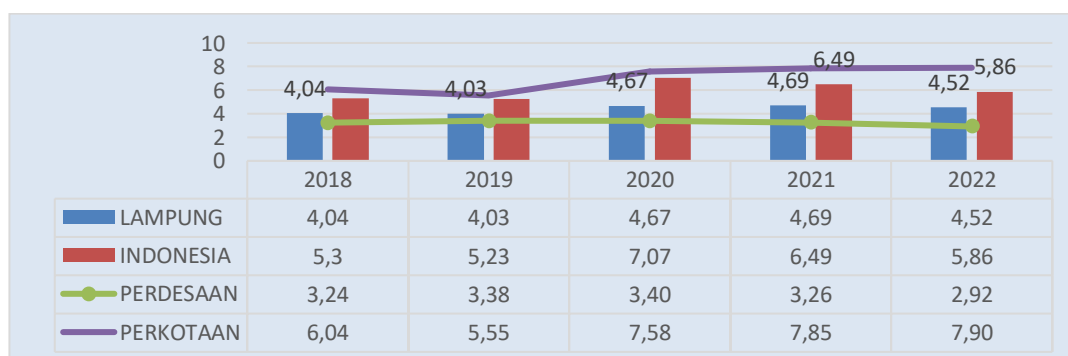
Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung (%)	4,62	4,33	4,06	4,03	4,67	4,69	4,52
Indonesia (%)	5,61	5,5	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Untuk menjadi perhatian, pada Agustus 2022, TPT perkotaan sebesar 7,90 persen lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (2,92 persen), dibandingkan Agustus 2021, TPT perkotaan naik sebesar 0,05 persen point sedangkan TPT perdesaan turun sebesar 0,34 persen point.

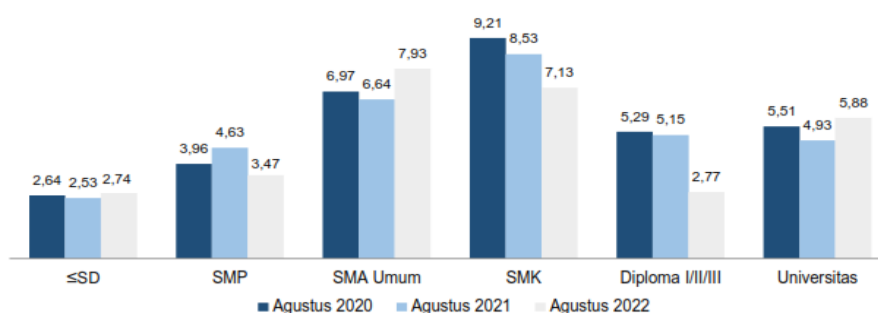
Grafik 3. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,93 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,74 persen. Dibandingkan Agustus 2021 kenaikan TPT dialami pada jenjang pendidikan SD ke bawah (0,21 persen poin), SMA Umum (1,29 persen poin) dan Universitas (0,95 persen poin), sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya mengalami penurunan.

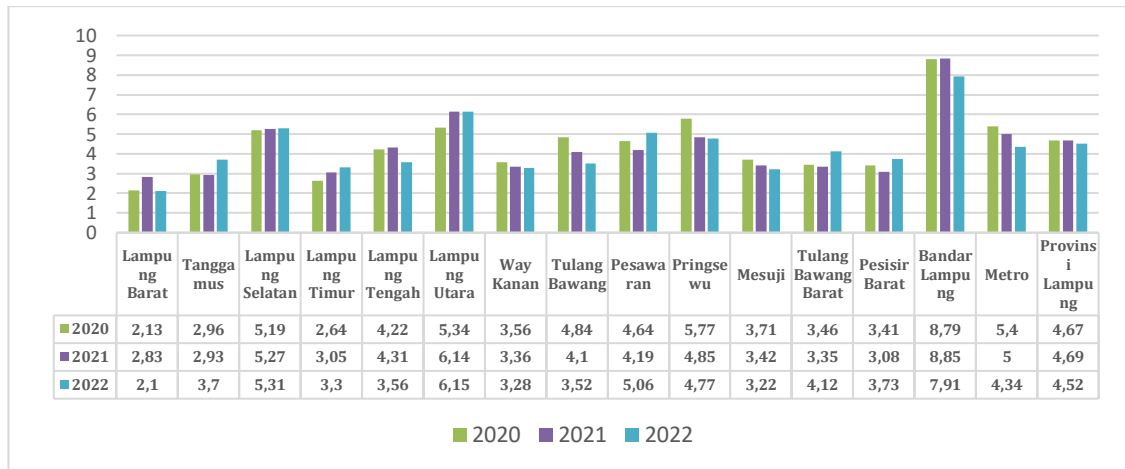
Grafik 3. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Lampung Agustus 2020-Agustus 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 8,85 persen diikuti Lampung Utara (6,14), Lampung Selatan (5,27%) dan Kota Metro yang mencapai 5,00 persen. Wilayah lain yang berada pada rata-rata Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,83 persen.

Grafik 3. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Kemiskinan

Angka kemiskinan Lampung Maret 2023 mengalami penurunan dibandingkan September 2022. Secara persentase turun dari 11,44% pada September 2022 menjadi 11,11% pada Maret 2023 atau jumlah penduduk Miskin turun dari 995,59 ribu menjadi 970,67 ribu orang. Tahun 2023, angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,36 persen.

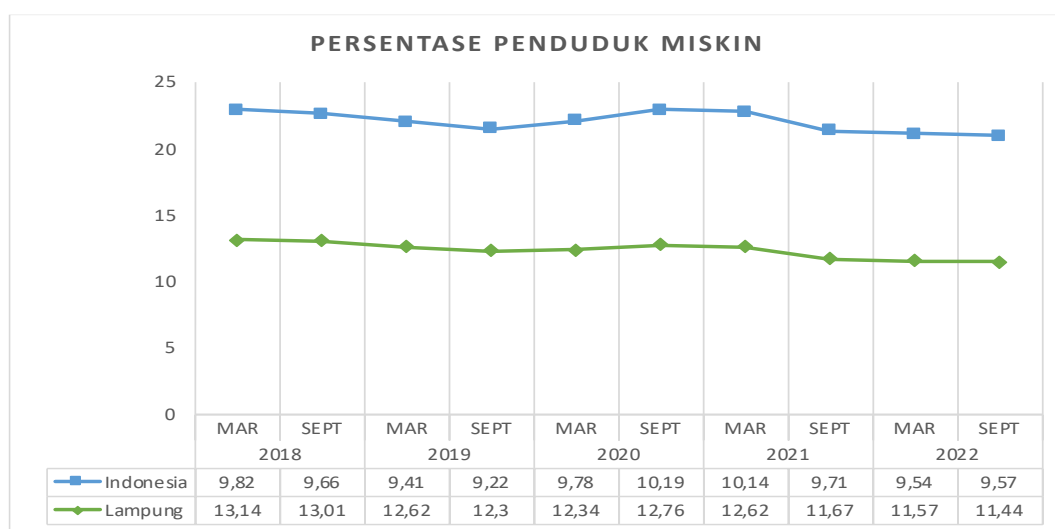
Grafik 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Secara umum, pada periode tahun 2014 - 2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan taraf kesejahteraan di masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 11,44 persen di 2022, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin secara Nasional yang berada pada angka 9,57 persen. Bila dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 11,43 ribu orang. Untuk September 2022, Provinsi Lampung berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 6,82 ribu orang dan menjadi 3 besar Provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak, bersama-sama Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Grafik 3. 12 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan tersebut menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk

(Rp/kapita/bulan). Artinya, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli.

Tabel II-23 menunjukkan pada September 2022 jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 756,48 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan jumlah penduduk miskin meningkat dari 236,48 ribu jiwa menjadi 239,11 ribu jiwa. Hal yang patut dicermati pula bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode 2017-2018 meningkat dan kembali menurun pada Tahun 2019. Akibat pandemic Covid 19, pada Tahun 2020 meningkat sebesar 15,39 persen. Untuk Tahun 2022 kembali menurun namun belum lebih baik dibandingkan Tahun 2017. Untuk kemiskinan di pedesaan, trend pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022
(Ribu Jiwa)

LOKASI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota	211,97	230,20	224,69	259,28	236,48	239,11
Desa	871,77	861,40	816,79	831,86	770,54	756,48
Kota + Desa	1.083,74	1.091,60	1041,48	1.091,14	1007,02	995,59

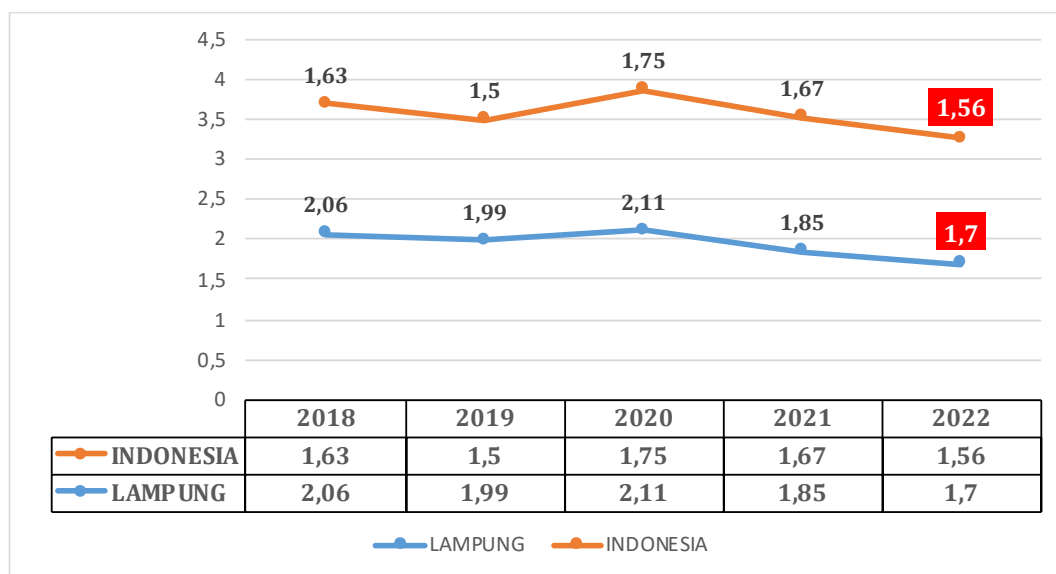
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 2,06 di tahun 2018 menjadi 1,70 pada September 2022. Bila dibandingkan September 2021, menurun dari 1,85 menjadi 1,70. Penurunan nilai P1 ini

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada tahun 2022 berada pada angka 1,56.

Grafik 3. 13 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Indonesia dan Lampung tahun 2016 – 2021 (persen)

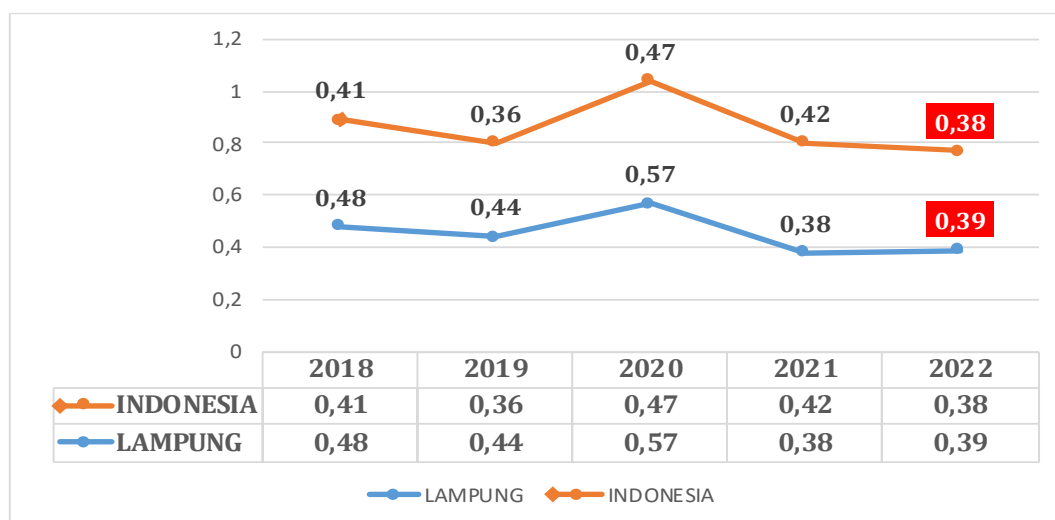


Sumber: BPS Susenas, 2022 diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,48 di Tahun 2018 menjadi 0,39 di 2022. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Saat Pandemi Covid 19, Tahun 2020, meningkat dari 0,47 menjadi 0,57 dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 0,38 dan sedikit meningkat di Tahun 2022 menjadi 0,39. Bila dibandingkan secara nasional, selama Tahun 2018-2022 P2 Provinsi

Lampung selalau berada di atas Nasional, hanya di Tahun 2021 capaiannya dibawah capaian nasional.

Grafik 3. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



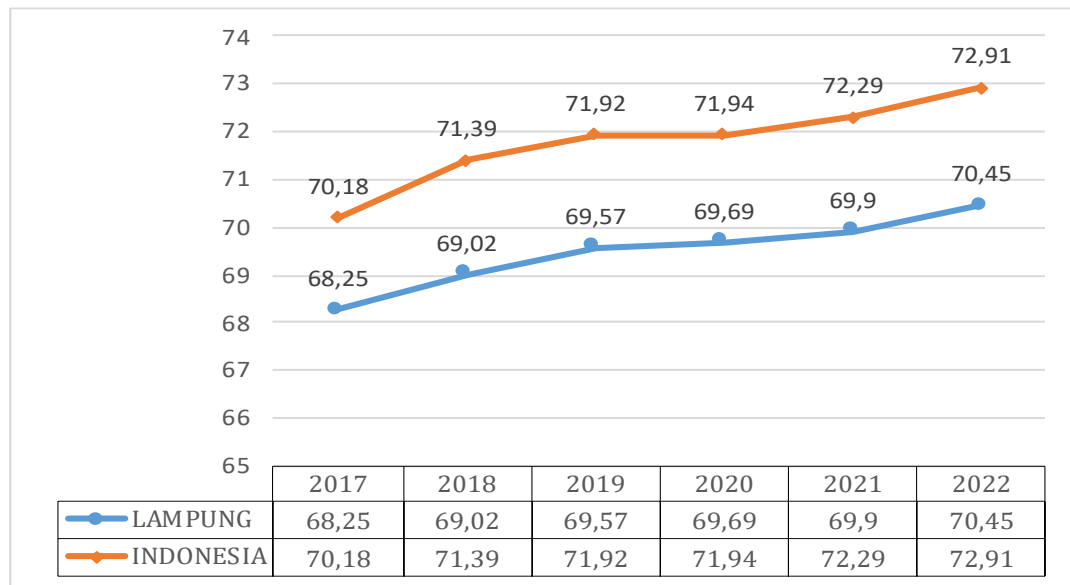
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan harus dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik 3. 15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Selama periode tahun 2017 s.d. 2022 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 68,25 di tahun 2017 menjadi 70,45 di tahun 2022. Namun, peningkatan IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 72,91. IPM Lampung rata-rata tumbuh sebesar 0,85 persen per tahun. Di tahun 2022 ini capaian IPM Provinsi Lampung masuk dalam kategori “TINGGI” dengan nilai IPM 70,45. IPM Provinsi Lampung Tahun 2022 meningkat 0,55 point atau tumbuh 0,79 persen dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan IPM 2022, didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita meningkat 298.000 poin dibanding tahun 2021.

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,74 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,73 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,10 tahun, dari 8,08 tahun menjadi 8,18 tahun pada tahun 2022. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun



2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,99 tahun, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 1,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2012, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Lampung adalah 69,33 tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 70,99 tahun. Dibandingkan Tahun 2021, UHH Provinsi Lampung meningkat dari 70,33 menjadi 70,99 Tahun atau meningkat 0,37 persen.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, HLS Lampung telah meningkat rata-rata 1,32 persen per tahun, sementara RLS meningkat rata-rata 1,07 persen per tahun. Pasca pandemi COVID-19, RLS dan HLS terus mengalami peningkatan.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,34 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,97 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Lampung, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan

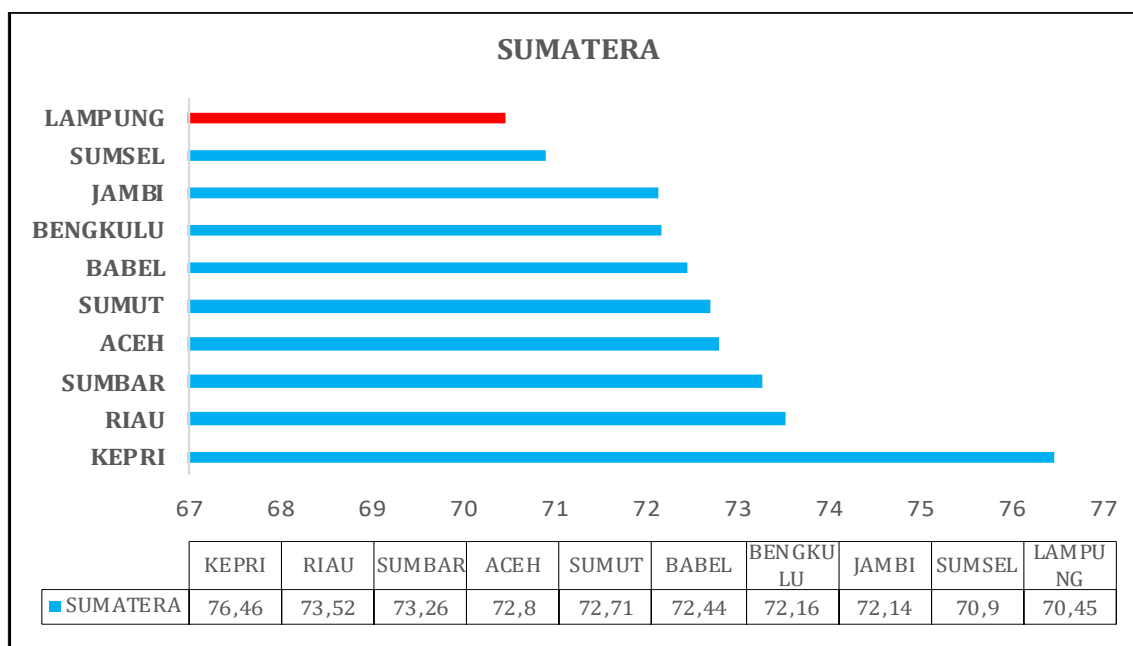
Tabel 3. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung
Berdasarkan Komposit 2017-2022

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	69.95	70.18	70.51	70.65	70.73	70,99
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.46	12.61	12.64	12.65	12.73	12,74
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.79	7.82	7.92	8.05	8.08	8,18
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	Rp.000	9,413	9,858	10,114	9,982	10,038	10,336
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68.25	69.02	69.57	69.69	69.90	70,45

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada lingkup nasional, capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (72,91). Di lingkup regional Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2022 berada pada posisi terendah. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Grafik 3. 16 Posisi IPM Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (64,94), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (78,01). Bersamaan dengan Provinsi Lampung, terdapat 1 kabupaten yang berubah status capaian IPM menjadi kategori “tinggi”, yaitu Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2022 adalah sebanyak 5, yaitu Kota Bandar Lampung (78,01), Kota Metro (77,89), Kabupaten Pringsewu (70,98), Kabupaten Lampung Tengah (70,80) dan Kabupaten Lampung Timur (70,58). Sedangkan 10 kabupaten lainnya berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus “rendah” ($\text{IPM} < 60$).

Tabel 3. 9 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2016 – 2022

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,50	67,80	67.9	68.39
Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42	66.65	67.22
Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36	68.49	69
Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37	69.66	70.58
Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16	70.23	70.8
Lampung Utara	65,95	66,58	67,17	67,63	67,67	67.89	68.33
Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44	67.57	68.04
Tulang Bawang	66,74	67,07	67,7	68,23	68,52	68.73	69.53
Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79	66.14	66.7
Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,30	70.45	70.98
Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63	64.04	64.94
Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,3	65,93	65,97	66.22	67.13
Pesisir Barat	61,5	62,2	62,96	63,79	63,91	64.3	65.14
Bandar Lampung	75,34	75,98	75,63	77,33	77,44	77.58	78.01
Metro	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19	77.49	77.89
Provinsi Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69.9	70.45

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

3.1.3. Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2023 Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2023

Pada tahun 2023, ketidakpastian global diperkirakan akan berangsurangsur membaik dan kondusif seiring dengan meredanya ketegangan isu geopolitik dan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas perdagangan internasional serta tingkat likuiditas global yang lebih tinggi. Sektor pariwisata akan semakin menggeliat didorong pelonggaran Jang terus dilakukan termasuk berakhirnya penerapan protokol kesehatan, yang didukung kuat oleh jumlah penduduk yang divaksinasi lengkap telah mencapai target.



Perkembangan berbagai proyek strategis juga diharapkan memperkuat perkembangan daya saing nasional terutama dalam mendorong integrasi ekonomi domestik. Tingkat perdagangan dan investasi juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan hilirisasi ekspor yang semakin meningkat serta kondisi pasar keuangan yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin kuat sehingga akan semakin banyak mengundang investor. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan yang terus didorong pemerintah akan semakin memantik perkembangan investasi yang lebih tinggi di Indonesia.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3-5,5 persen pada tahun 2023. Selain itu Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Arlas Method*) menjadi US\$4.760-4.770 pada tahun 2023, diharapkan mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. (*sumber Perpres 134 Pemutakhiran RKP 2023*).

Secara keseluruhan untuk tahun 2023, prospek penguatan ekonomi semakin kuat. Permintaan domestik diperkirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh pada kisaran 4,5% - 5,0%, di tengah risiko global *downturn*. Kinerja konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2023 diperkirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diperkirakan meningkat didorong oleh ekspektasi meningkatnya investasi. Terkait dengan Proyek Startegis Nasional (PSN), aktivitas pembangunan Bakauheni Harbour City (BHC) diperkirakan meningkat pada semester I 2023 denghan ditunjang opening Krakatau Park. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan kenaikan pagu belanja APBD sebesar 42,92% (yoy) dan APBN



di Provinsi Lampung sebesar 30,00% (yoy), yang disertai prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2023 diperkirakan meningkat, didukung oleh kenaikan pendapatan dan terjaganya optimisme di tengah laju inflasi yang diperkirakan lebih moderat. Akselerasi pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi. Optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan meningkat, terutama ekspektasi peningkatan aktivitas usaha dan penjualan pada tahun 2023, di mana pemulihan konsumsi Rumah Tangga pada tahun sebelumnya dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: peningkatan laju inflasi, penurunan pendapatan ekspor, dan *scarring effect* (efek kekhawatiran dan ketakutan karena pandemic Covid-19) yang masih dialami oleh sektor Industri Pengolahan serta Sektor Parwisiata. Optimisme tersebut terkonfirmasi dari hasil survei KPw Bl Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap peningkatan penjualan, tingkat upah, dan harga jual pada tahun 2023. Dari sisi pendapatan masyarakat, *disposable income* (penghasilan tahunan dikurangi pajak) pada tahun 2023 diperkirakan meningkat terutama didorong oleh peningkatan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2023 sebesar 7,90%, lebih tinggi jika dibandingkan kenaikan UMP pada 2 tahun terakhir. Peningkatan aktivitas usaha, terjaganya optimisme, dan peningkatan pendapatan masyarakat merupakan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi tahun 2023 yang lebih *resilient* (ulet/tahan banting), di tengah laju inflasi yang diperkirakan lebih moderat. Sementara itu, komponen Dana Pihak Ketiga, terutama tabungan, terpantau cukup untuk mendukung konsumsi.

Kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan pagu belanja pemerintah. Pagu belanja APBN di Provinsi Lampung pada tahun 2023 meningkat, tumbuh 30% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 27,8% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja APBN K/L di Provinsi Lampung tahun 2023 yang mencapai 17 .27% (yoy) dibandingkan



dengan realisasi tahun sebelumnya yang terkontraksi 50,26% (yoy), di tengah pagu Dana Transfer yang tumbuh melambat sebesar 4,17% (yoy). Dari sisi belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2023 tumbuh 12% dan 14% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan kinerja pendapatan/belanja masing-masing sebesar -6,46% (yoy) dan -27,23% (yoy). Kenaikan belanja pemerintah pada tahun 2023 terutama didorong oleh kenaikan anggaran belanja untuk belanja pegawai. Adapun pagu belanja hibah juga tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, kinerja investasi pada tahun 2023 diperkirakan meningkat didorong oleh perbaikan kinerja investasi swasta. Peningkatan Kinerja Investasi/PMTB terutama didorong oleh peningkatan investasi swasta. Sementara itu, untuk proyek pemerintah, realisasi pembangunan PSN pada tahun 2023 akan didominasi oleh percepatan penyelesaian pembangunan tahap pertama untuk Bakauheni Harbour City. Kinerja investasi Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan meningkat namun pada level yang moderat, terutama disebabkan oleh realisasi pembangunan beberapa PSN yang memerlukan upaya *debottlenecking* lebih lanjut, yaitu logistik kereta api Lahat - Muara Enim - Prabumulih Tarahan dan Kawasan Industri Tanggamus.

Moderasi kinerja sektor eksternal diperkirakan berlanjut pada tahun 2023 sejalan dengan melambatnya volume perdagangan global. Pada tahun 2023, kinerja ekspor Provinsi Lampung diperkirakan termoderasi akibat meningkatnya permintaan domestik untuk CPO di menurunnya produktivitas TBS Kelapa Sawit, melambatnya permintaan energi global, dan normalisasi Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI). Memasuki tahun 2023, permintaan minyak kelapa sawit domestik meningkat seiring implementasi B35 di Indonesia, yang mendorong peningkatan permintaan CPO domestik seiring dengan meningkatnya kuota biodiesel nasional dan Sumatera. Sejalan dengan peningkatan permintaan CPO domestik seiring dengan imlementasi B35, pemerintah melakukan pengetatan kebijakan ekspor dengan menurunkan rasio domestik:ekspor pada kebijakan Domestic Market Obligation (CPO) dari 1 :8 pada tahun 2022 menjadi 1 :6 pada tahun 2023. Hal



tersebut berisiko menyebabkan penurunan kerja ekspor CPO tahun 2023 di tengah penurunan kinerja produksi di sisi hulu. Produksi TBS Kelapa Sawit pada tahun 2023 diperkirakan melambat, akibat pemupukan yang kurang optimal pada semester II tahun 2021. Sementara itu, terkait komoditi batu bara, permintaan batu bara global pada tahun 2023 diperkirakan melambat. Perlambatan permintaan tersebut sejalan dengan kinerja perekonomian India, AS, EU, dan Sebagian besar negara yang diperkirakan melambat. Meski demikian, perlambatan lebih jauh tertahan oleh prospek peningkatan impor batu bara Tiongkok sejalan dengan pembukaan aktivitas ekonomi secara penuh di tahun 2023. Lebih lanjut, melambatnya kinerja ekspor juga dipengaruhi normalisasi IHKEI seiring dengan pemulihan produksi kelapa sawit Malaysia, perbaikan hubungan geopolitik Tiongkok - Australia, meningkatnya akses EU terhadap pipeline gas non-Rusia, dan berlanjutnya pemulihan ekspor Rusia.

Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal serta menjaga stabilitas makroekonomi di tengah adanya *scarring* effect akibat COVID-19 dan meningkatnya risiko inflasi akibat tekanan eksternal dan domestik, diperlukan upaya penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak. Beberapa strategi dan kebijakan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi dan inflasi yang rendah dan terkendali, antara lain :

1. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
2. Mendorong investasi swasta dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian *debottlenecking* kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek *clean and clear*, serta sinergi *calendar of event* promosi investasi dan perdagangan antar instansi.

3. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui digitalisasi dan pendekatan baru antara lain melalui *behaviorally informed policy intervention*, guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
4. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di E-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di E-Katalog (1000 UMK/Pemda).
5. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
6. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

3.1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2023

Meninjau perkembangan perekonomian daerah terkini yang telah diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tantangan dan prospek serta berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan bahwa asumsi dasar makro ekonomi daerah tahun 2023, mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2023	Sasaran pada APBD 2023	Capaian s/d Tw II-2023	Sasaran pada Perubahan RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 – 4,5	3,5 - 4,5	4,96 (TW I-2023)	4,5 – 5,0
2	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	43 - 44	43 – 44	45,10 (2022)	43 - 44
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,3 - 70,6	70,3 – 70,6	70,45 (2022)	70,4 – 70,9
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3 - 4,0	4,3 – 4,0	4,18 (Feb 2023)	4,3 - 4,0
5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,9 - 11,4	11,9 – 11,4	11,11 (Mar 2023)	11,4 – 10,9
6	Indeks Gini	0,302 - 0,319	0,302 – 0,319	0,324 (Mar 2023)	0,302 - 0,319
7	Inflasi (%)	2 - 4	2 - 4	3,24 (Juni 2023)	2 - 4
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	74,87	77	76,85 (2022)	77
9	Nilai Tukar Petani	104 - 105	104 - 105	108,96 (Juni 2023)	104 - 105
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,04	9,55	13,63 (2022)	9,55
11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7.066	7,066	12,84 (2022)	7.066

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung dan BPS, 2023

Dari tabel diatas, indikator yang mengalami perubahan angka target pada Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan. Perubahan angka target pertumbuhan ekonomi mempertimbangkan kinerja perekonomian pada triwulan I tahun 2023 dan perkiraan kinerja perekonomian secara keseluruhan tahun 2023. Perubahan angka target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempertimbangkan kinerja pada triwulan I tahun 2023. Tingkat Kemiskinan (%) terjadi perubahan target yang semula 11,9 – 11,4% menjadi 11,4 – 10,9%.

3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan tetap akomodatif mendukung pemantapan *recovery* dan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan defisit. Selain itu ditengah resiko perlambatan ekonomi dunia akibat tingginya inflasi, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2023 diarahkan pada upaya menjaga 4 K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya peningkatan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Dengan membaiknya perekonomian Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang dibuktikan dari capaian laju pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 4,96 persen, hal tersebut berpengaruh kepada pengelolaan keuangan provinsi Lampung yang semakin baik. Sampai dengan Triwulan II Pendapatan Daerah telah terrealisasi sebesar Rp. 2.855.535.282.073,00 (38,52 persen); selanjutnya pada sektor Belanja Daerah sampai dengan Triwulan telah terrealisasi sebesar Rp. 2.354.411.299.354,66 (31,89 persen); serta pembiayaan daerah pada komponen Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 105.882.243.536,00 dialokasikan untuk penyelesaian pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo kepada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dengan demikian seluruh kewajiban pembayaran cicilan pokok hutang Pemerintah Daerah telah selesai di Tahun Anggaran 2023.

Terdapat beberapa penyesuaian belanja daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam rangka pemenuhan Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, termasuk pula pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator



Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK dan adanya perubahan kerangka kebijakan keuangan negara pada Perubahan APBN T.A. 2023 dan penguatan perekonomian pasca pandemic Covid-19 sehingga RKPD Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Semester I (Pertama) Tahun 2023 dalam upaya mengoptimalkan sektor pendapatan daerah melalui pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pembayaran retribusi dan pajak kendaraan bermotor pada instansi-instansi pemerintah, swasta dan pusat keramaian, memperluas aksesibilitas dan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak, mengintensifkan rekonsiliasi dan koordinasi data pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan penerimaan-penerimaan lainnya yang berasal dari pusat dan daerah serta meningkatkan fungsi pengawasan pada tata kelola sektor pendapatan daerah. Untuk Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Perubahan Anggaran Tahun 2023, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi



daerah, dan dana transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain :

1) Pendapatan Asli Daerah

1. Mengoptimalkan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).
4. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.
5. Mengupayakan adanya reward bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
6. Mengoptimalkan pendataan dan pemungutan Pajak Alat Berat sebagai tindaklanjut UU Nomor 1 Tahun 2022.
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
8. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
9. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian bahan bakar minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
10. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.

11. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
 12. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
 13. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
 14. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
 15. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Stakeholder penghasil pendapatan daerah.
 16. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
 17. Mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 18. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
 19. Mengoptimalkan Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi :
- Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di provinsi lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21,
 - Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.

- 
- Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer.
 - Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan .

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan Tahun 2023 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 11 Target Perubahan Pendapatan Tahun 2023 Provinsi Lampung

URAIAN	Realisasi/Proyeksi Pendapatan Provinsi Lampung				
	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Proyeksi/Target pada RKPD Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH	6.958.447.624.498,00	7.412.643.433.222,00	2.855.535.282.073,44	7.515.623.079.662,39	7.905.474.971.302,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.678.122.084.867,00	4.146.226.408.108,00	1.795.886.927.721,44	4.243.823.111.662,39	3.590.574.404.562,84
Pendapatan Pajak Daerah	3.126.137.885.658,00	2.982.798.551.971,00	1.516.064.431.178,00	3.183.838.200.125,00	2.990.347.024.353,54
Pendapatan Retribusi Daerah	6.602.045.154,00	4.146.226.408.108,00	2.434.317.282,00	6.554.571.420,00	14.638.071.549,30
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	45.568.658.794,74	4.146.226.408.108,00	51.022.011.099,39	376.138.511.099,39	100.925.001.063,00
Lain-lain PAD yang Sah	499.813.495.260,66	4.146.226.408.108,00	226.366.168.162,05	677.291.829.018,00	484.664.307.597,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.240.611.684.323,00	3.251.814.923.379,00	1.055.694.742.352,00	3.257.723.437.265,00	4.300.856.525.740,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.225.777.269.427,00	3.224.292.047.691,00	1.041.902.756.000,00	3.224.097.777.757,00	4.271.479.149.796,00
Dana Perimbangan	3.224.336.095.427,00	3.173.446.713,00	1.016.480.089.000,00	3.173.252.443.757,00	4.248.958.921.833,00
Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal	1.441.174.000,00	50.845.334.000,00	25.422.667.000,00	50.845.334.000,00	22.520.227.963,00
Transfer Antar Daerah	14.834.414.896,00	27.522.875.688,00	13.791.986.352,00	33.625.659.508,00	29.377.375.944,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	27.522.875.688,00	13.791.986.352,00	33.625.659.508,00	29.377.375.944,00
Bantuan Keuangan dari Pemkab/Pemkot	14.834.414.896,00	-	-	-	29.377.375.944,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.713.855.308,00	14.602.101.735,00	3.953.612.000,00	14.076.530.735,00	14.044.041.000,00
Pendapatan Hibah	10.565.423.805,00	29.163.781.517,00	14.602.101.735,00	3.953.612.000,00	14.076.530.735,00

Sumber : BAPENDA Provinsi

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 diarahkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) agar lebih efisien dan produktif yang dilakukan melalui :

- 1) Memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu belanja operasi antara lain didalamnya belanja pegawai, belanja bunga serta belanja barang dan jasa yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Subkegiatan. Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan stimulus kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 2) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat.
- 4) Belanja transfer merupakan bantuan Keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu



capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota yang salah satunya digunakan untuk peningkatan kemantapan jalan provinsi di kabupaten dan kota yang mekanismenya sedang dilakukan pembahasan.

Tabel 3. 12 Kerangka Keuangan Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Uraian	Realisasi/Proyeksi Belanja Provinsi Lampung				
	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Proyeksi/Target pada RKPD Tahun 2024
BELANJA OPERASI	4.533.082.558.484,61	4.579.790.222.466,01	1.576.394.191.055,28	6.076.811.958.814,82	4.712.827.849.386,24
Belanja Pegawai	1.970.972.929.853,00	2.144.517.042.070,52	972.942.546.931,00		4.712.827.849.386,24
Belanja Barang dan Jasa	1.816.562.339.989,79	1.778.871.546.972,49	532.023.187.014,06		2.215.937.102.841,26
Belanja Bunga	12.829.045.899,00	3.547.643.288,00	3.112.977.135,00		1.914.991.860.164,64
Belanja Subsidi		-	-		22.694.508.528,07
Belanja Hibah	712.329.197.992,82	638.474.280.135,00	68.193.027.975,22		
Belanja Bantuan Sosial	20.389.044.750,00	14.379.710.000,00	122.452.000,00		549.906.460.652,27
BELANJA MODAL	1.025.176.634.169,33	1.306.431.823.032,95	176.706.928.534,38		1.682.647.155.669,12
BELANJA TIDAK TERDUGA	223.500.000,00	31.500.000.000,00	2.584.382.500,00		34.728.750.000,00
BELANJA TRANSFER	1.353.114.947.401,00	1.464.039.744.187,04	598.725.797.265,00	1.599.136.520.748,94	1.409.984.216.247,48
Belanja Bagi Hasil		1.464.039.744.187,04			
Belanja Bantuan Keuangan					
Total	6.911.597.640.054,94	7.381.761.789.686,00	2.354.411.299.354,66	7.675.948.479.564,00	7.840.187.971.302,84

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2023

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK, yaitu sebesar Rp. 292.773.893.437,37

Adapun kerangka pembiayaan Perubahan RKPD Tahun 2023 di sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 13 Kerangka Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023	Proyeksi/Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Proyeksi/Target pada RKPD Tahun 2024
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	383.279.770.163,01	75.000.000.000,00	-	292.773.893.437,37	50.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	141.176.332.704,00	105.882.243.536,00	105.882.243.536,00	105.882.243.536,00	115.287.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-			
(Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo)		105.882.243.536,00	105.882.243.536,00	105.882.243.536,00	
Pembiayaan Netto	242.103.437.459,01	(30.882.243.536,00)	(105.882.243.536,00)	186.891.649.901,37	(65.287.000.000,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	288.953.421.902,47	75.000.000.000,00	-	292.773.893.437,37	50.000.000.000,00

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2023



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu :

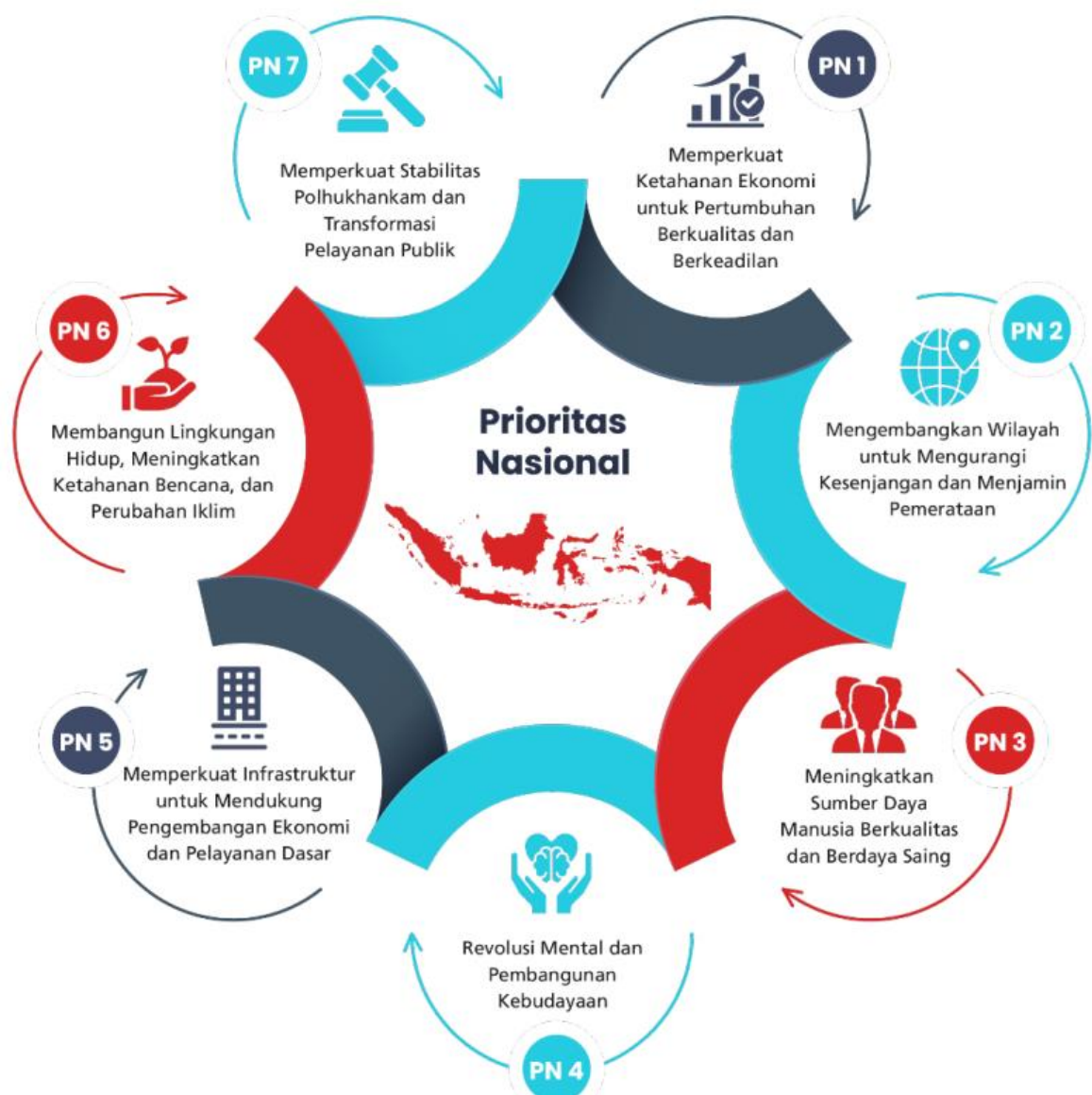
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.



Sumber : Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis di bawah ini.



Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima Kebijakan Prioritas, antara lain: Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, **Bandar Lampung**), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok).

Selaras dengan Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera, berdasarkan RTRW Provinsi Lampung, saat ini dikembangkan **Kawasan**

strategis provinsi untuk peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kawasan strategis yang mempunyai potensi ekonomi, sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan sudah mampu mendorong perkembangan daerah sekitar. Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi ini mencakup :

a. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung, yang dilandaskan upaya untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien serta menjaga supaya tidak terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan saja. Lingkup dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini adalah Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung ini sebagai pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi, mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau, menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi. Pengembangan Kawasan Metropolitan Bandar Lampung juga didukung oleh pengembangan beberapa fungsi utama dari sub kawasan di dalamnya, yaitu :

- Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung. Kawasan pelabuhan terpadu terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi. Untuk meningkatkan peran pelabuhan tersebut, di kawasan pelabuhan terpadu Panjang juga dikembangkan sebagai kawasan industri.
- Kawasan Pemerintahan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah

sangat padat dengan berbagai permasalahan kota, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung yang ada sekarang akan dipindahkan ke Jati Agung (Kabupaten Lampung Selatan).

- Kawasan *Aeropolitan* Natar di Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan rencana pengembangan Kawasan Bandara Raden Inten II sebagai *Aero City* di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diantisipasi adanya rencana pengembangan kawasan *Aeropolitan* Natar yang mengintegrasikan antara Kota Bandar Lampung dengan *Aero City* Raden Inten II, sehingga ke depan dapat menjadi kawasan *aeropolitan*.
- Kawasan Teluk Lampung, akan dikembangkan menjadi kawasan wisata terintegrasi Bakauheni *Harbour City (BHC)*. Kawasan Teluk Lampung tersebut mengintegrasikan destinasi wisata disekitar teluk lampung yang meliputi wisata pantai, wisata budaya dan Taman Hutan Raya WAR. Kawasan Teluk Lampung ini memiliki potensi alam yang beragam sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan.
- Kawasan Pusat Pertahanan dan Keamanan dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang telah memiliki Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai dan Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir.
- Kawasan Pendidikan Terpadu UNILA – ITERA – UIN Raden Intan II (LARAIN). Kawasan ini terdapat di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan pendidikan LARAIN ini nantinya diproyeksikan akan menampung *student body* sekitar 120.000 orang. Untuk mendukung fungsi kawasan pendidikan di Provinsi Lampung.

b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat, Kawasan ini meliputi Pantai sepanjang 210 Km di Kabupaten Pesisir Barat yang terintegrasi dengan pariwisata Danau Ranau dan Agro Wisata Kopi di Kabupaten Lampung Barat.

Terkait Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan terdapat Program Prioritas yang berlokasi di Provinsi Lampung antara lain:

Tabel 4. 1 Program Prioritas Nasional di Provinsi Lampung

No.	PN/ ProP	Sasaran	Indikator	Target
1.	Pengembangan Komoditas Unggulan karet di Provinsi Lampung	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi per tahun komoditas unggulan Provinsi Lampung - karet	5-7 %
2.	Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung – perikanan budidaya	5-7 %
3.	Pengembangan Komoditas unggulan lada, pala, cengkeh di Provinsi Lampung	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan komoditas unggulan per tahun provinsi lampung - pala	3-5 %
4.	Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung	Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas	Jumlah materi teknis rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	2 rekomendasi kebijakan
			Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	2 rekomendasi kebijakan

Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2023

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut serta pencapaian sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 , maka sasaran makro pembangunan nasional tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

SASARAN MAKRO RKP 2023	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2023
	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,5
	- Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy)	2,0-4,0
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
	- Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
	- Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
	- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02
	- Nilai Tukar Petani (NTP)	103-107
	- Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-108

Sumber : Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung masih mengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 yang telah ditetapkan, yakni **“PENGUATAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH”** yang ditempuh melalui 6 (enam) prioritas pembangunan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Secara garis besar, keseluruhan prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran makro pembangunan. Penetapan sasaran makro

pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II-2023, maka sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2023	Sasaran pada APBD 2023	Sasaran pada Perubahan RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 – 4,5	3,5 - 4,5	4,5 – 5,0
2	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	43 - 44	43 – 44	43 - 44
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Poin)	70,3 – 70,6	70,3 – 70,6	70,4 – 70,9
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,3 – 4,0	4,3 – 4,0	4,3 - 4,0
5	Kemiskinan (%)	11,9 – 11,4	11,9 – 11,4	11,4 – 10,9
6	Gini Rasio (Poin)	0,302 – 0,319	0,302 – 0,319	0,302 - 0,319
7	Inflasi (%)	2 - 4	2 - 4	2 - 4
8	Tingkat Kemantapan Jalan(%)	74,87	77	77
9	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	104 - 105	104 - 105	104 - 105
10.	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,04	9,55	9,55
11.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	7,066	7,066	7.066

Sumber : Bappeda Prov. Lampung, 2023

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, Prioritas Nasional 2023 dan RPJMD Tahun 2019-2024

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Pembangunan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2019-2024 :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Memperhatikan visi pembangunan tersebut dan Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan 2023 dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023.

Tabel 4. 4 Keselarasan RPJMD 2019-2024, Prioritas Pembangunan Daerah 2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2023

Visi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024 : “ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA ”		
Keselaran		
Misi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Prioritas Pembangunan Nasional 2023
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Mewujudkan " <i>good govemance</i> " untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public	Reformasi Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel	Pembangunan SDM dengan pengarusamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Infrastruktur utk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

Visi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024 : “ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA ”		
Keselarasan		
Misi Gubernur/Wakil Gubernur 2019-2024	Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Prioritas Pembangunan Nasional 2023
		Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan Bersama	Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada sasaran pokok dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2019-2024 dan RKP Tahun 2023 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

Tabel 4. 5 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Provinsi Lampung 2023 dengan RPJMD 2019-2024

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2023	Sasaran RKPD 2023		Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2023	Target
1.	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	a.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,5
			b.	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	75
			c.	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,8
2.	Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	a.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	B
3	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	a.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,5
			b.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,68
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,3
			c.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,3 – 4,0
			d.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	69,18
			e.	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,37
4.	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	Pembangunan Infrastruktur	a.	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	74,87
			b.	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	92,31

No.	Misi Gubernur Lampung Tahun 2019-2024	Prioritas RKPD 2023	Sasaran RKPD 2023		Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2023	Target
			c.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	98
5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	a.	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,0
			b.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	104- 105
			c.	Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	2 - 4
			d.	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,4 – 10,90
6	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	a.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.09
			b.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	7,066
			c.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	139,1

4.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Lampung tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periodisasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs tahun 2020-2024. Sama seperti pada tahun sebelumnya, pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2023 masih menghadapi kendala akibat dampak adanya pandemi *COVID-19*, yang berdampak pada semua aspek kehidupan diantaranya ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan bahkan pemerintahan.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung masih menggunakan capaian Tahun 2022 sebagai berikut:

- Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori SUDAH TERCAPAI adalah pada Pilar Ekonomi sebanyak 70,45% (31 indikator dari total 44 indikator).
- Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori TIDAK TERCAPAI adalah Pilar Lingkungan sebanyak 17,64% (6 indikator dari total 34 indikator).

Tantangan pembangunan yang berwujud kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, kerawanan sosial, kualitas sumber daya manusia yang kurang bersaing masih menjadi tantangan serius bagi provinsi Lampung, sehingga strategi kebijakan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diupayakan melalui rangkaian startegi dan kebijakan antara lain:

- Pengintegrasian SDGs/TPB dengan Dokumen Perencanaan Daerah. SDGs/TPB bukan agenda pembangunan tersendiri dan harus terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga program dan kegiatan, dengan demikian, agenda SDGs/TPB tidak menjadi kontraproduktif dengan agenda pembangunan daerah.
- Menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan bersama. Isu SDGs/TPB ini melibatkan 4 pilar yaitu : Pemerintah, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha dan Filantropi, serta media massa dan organisasi kemasyarakatan.
- Penyediaan data yang berkualitas, terintegrasi dan mudah diakses. Dengan 17 Tujuan, 169 Target dan 240 Indikator kebutuhan data sebagai alat ukur kinerja yang berkualitas dan terpercaya menjadi sebuah keniscayaan.

4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Capaian SPM sampai dengan Triwulan II-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 6 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2023

No.	Bidang	Capaian (%)
1.	Pendidikan	74
2.	Kesehatan	51
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	63
6.	Sosial	61
	Rata -rata	59

Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Rata-rata capaian SPM Provinsi Lampung Triwulan II-2023 telah tercapai dengan realisasi yang cukup tinggi. Diharapkan capaian kinerja SPM akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2023.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program dan kegiatan yang dirancang dalam Perubahan RKPD 2023 secara lebih detail disajikan pada Lampiran I. Adapun uraian dalam sub bab ini merupakan rekapitulasi dari program dan kegiatan berdasarkan : 1) Prioritas Pembangunan Daerah; 2) Urusan pemerintahan; dan 3) Perangkat Daerah.

5.1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2023

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
1. Pembangunan Sdm Dengan Pengarusutama Gender, Pemberdayaan Kaum Difabel Dan Perlindungan Anak			
1.1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	958.666.236.542	997.734.581.222
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	737.345.035.000	743.637.315.963
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.881.900.000	12.881.900.000
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	2.200.000.000	2.209.396.500
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	615.000.000	615.000.000
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	400.000.000	400.000.000
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	350.000.000	350.000.000
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	3.900.000.000	4.036.285.800
1.2	Dinas Kesehatan		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	73.471.602.297	75.543.199.815
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	192.548.167.528	209.928.466.750
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.749.430.000	2.795.431.080
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	220.000.000	220.000.000
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	600.000.000	750.000.000
1.2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	371.914.671.437	464.104.910.669
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	492.200.000	519.321.482
1.2	Rumah Sakit Jiwa		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.097.513.357	48.325.834.623
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	471.068.600	523.028.700
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.624.000	335.203.700
11.1	Dinas Sosial		

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.599.579.910	23.143.029.340
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	526.682.950	526.682.950
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	249.999.500	263.499.500
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	10.833.813.022	11.070.313.022
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.370.059.665	1.370.059.665
1.06.06	Program Penanganan Bencana	947.505.677	1.147.505.677
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	333.747.273	483.747.273
12.1	Dinas Tenaga Kerja		
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.995.452.969	27.330.275.464
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	142.000.000	142.000.000
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.553.000.000	1.553.000.000
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	900.000.000	796.978.300
2.07.05	Program Hubungan Industrial	394.806.000	394.806.000
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	520.000.000	520.000.000
13.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.004.522.882	11.815.260.511
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	987.955.000	987.955.000
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	1.010.840.000	1.010.840.000
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	485.780.000	485.780.000
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	241.243.000	241.243.000
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	617.634.000	617.634.000
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	249.182.000	249.182.000
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	61.038.000	61.038.000
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	71.918.000	71.918.000
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	265.888.000	265.888.000
16.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi		
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.925.644.509	15,052,427,281
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	140.000.000	140.000.000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.200.000.000	1.200.000.000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.390.000.000	1.390.000.000
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	550.000.000	550.000.000
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	150.000.000	90,800,000
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	150.000.000	198.000.000
21.1	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.730.279.893	19.248.187.737
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.648.918.000	7.148.918.000
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	31.449.912.000	41.599.912.000
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.208.385.000	2.208.385.000
32.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.025.478.008	29.628.871.950
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.253.526.884	4.228.526.884
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.702.426	3.549.702.426
	Sekretariat Daerah		
39.2	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.168.609.000	1.276.046.500
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	87.888.450.028	106.644.928.368
2. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Untuk Mengurangi Kemiskinan Dan Ketimpangan			
25.1	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung		
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	227.687.500	227.687.500
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.144.522.100	3.144.522.100
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	300.000.000	300.000.000
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.222.440.000	1.222.440.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.239.388.415	47.226.103.498
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.143.167.700	9.143.167.700

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	33.362.024.639	33.362.323.639
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.188.556.300	1.188.556.300
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	3.760.442.000	3.760.442.000
19.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.457.151.534	11.712.250.859
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	400.000.000	400.000.000
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	250.000.000	250.000.000
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	150.000.000	150.000.000
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	3.733.439.000	3.749.015.600
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	400.000.000	400.000.000
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	1.800.000.000	1.800.000.000
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	600.000.000	600.000.000
20.1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.252.362.620	16.876.035.454
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	440.000.000	440.000.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	425.000.000	425.000.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	500.000.000	500.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	801.000.000	812.835.000
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000
23.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.413.295.517	19.893.153.102
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.275.000.000	1.275.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.016.662.200	14.036.662.200
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.687.858.000	4.696.025.700
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.936.000.000	1.936.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.895.000.000	2.895.000.000
24.1	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.533.607.037	13.507.262.027
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.650.000.000	1.856.718.150
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	2.256.148.000	2.516.148.000
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.357.419.000	1.357.419.000
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	11.225.000.000	11.125.000.000
28.1	Dinas Kehutanan		
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	65.951.612.470	62.522.716.289
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	3.917.395.000	3.667.439.000
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	687.122.000	687.122.000
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.544.570.082	1.804.570.082
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	215.988.000	215.988.000
29.1	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral		
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.885.872.158	17.040.176.540
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	600.000.000	600.000.000
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	519.110.000	519.110.000
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.659.790.000	1.659.790.000
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.174.210.000	1.174.210.000
30.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.257.566.549	19.479.431.589
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	70.000.000	58.750.000
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	380.000.000	580.000.000
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	1.200.000.000	1.250.000.000
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.213.000.000	1.309.400.000
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	800.000.000	791.750.000
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7.392.412.530	6.831.448.307
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	175.000.000	175.000.000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80.000.000	80.000.000
32.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.025.478.008	29.628.871.950
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.253.526.884	4.228.526.884
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.702.426	3.549.702.426
37.1	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.647.743.352	9.350.513.435
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.179.361.484	2.179.361.484
	Sekretariat Daerah		
39.2	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.168.609.000	1.276.046.500
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	87.888.450.028	106.644.928.368
39.4	Biro Perekonomian		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.131.785.500	1.189.318.500
4.01.06	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.868.214.500	1.810.681.500
3. Reformasi Birokrasi			
15.1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.752.408.425	7.158.718.656
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	93.900.000	407.936.043
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	129.556.000	129.556.000
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	159.261.000	159.261.000
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	89.122.000	89.122.000
18.1	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.373.931.708	18.595.737.786
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	19.015.225.489	19.215.225.489
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.760.554.200	12.760.554.200
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	286.497.000	286.497.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	269.233.300	269.233.300

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
20.1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.252.362.620	16.876.035.454
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	440.000.000	440.000.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	425.000.000	425.000.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	500.000.000	500.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	801.000.000	812.835.000
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000
23.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.413.295.517	19.893.153.102
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.275.000.000	1.275.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.016.662.200	14.036.662.200
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.687.858.000	4.696.025.700
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.936.000.000	1.936.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.895.000.000	2.895.000.000
31.1	Inspektorat		
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.075.727.469	38.644.453.362
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.366.415.000	6.476.290.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.042.162.000	1.096.162.000
32.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.025.478.008	29.628.871.950
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.253.526.884	4.228.526.884
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.702.426	3.549.702.426
33.1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	262.221.358.560	112.175.332.218
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.509.470.079.575	1.654.815.361.183
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.913.542.200	7.913.542.200
34.1	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	122.321.971.064	126.075.147.696

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
	Daerah Provinsi		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.685.667.800	16.685.667.800
35.1	Badan Kepegawaian Daerah		
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.091.865.780	17.281.183.424
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	7.689.668.885	8.690.928.535
36.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.159.293.058	20.584.127.205
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.262.693.600	10.292.516.050
37.1	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.647.743.352	9.350.513.435
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.179.361.484	2.179.361.484
38.1	Badan Penghubung		
5.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.852.867.837	16.723.604.422
5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	1.834.014.400	1.834.014.400
	Sekretariat Daerah		
39.2	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.168.609.000	1.276.046.500
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	87.888.450.028	106.644.928.368
39.1	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.901.658.500	1.901.658.500
4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.798.341.500	1.798.341.500
39.3	Biro Hukum		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.773.440.600	1.773.440.600
4.01.05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.776.559.400	1.776.559.400
39.6	Biro Administrasi Pembangunan		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	919.500.000	919.500.000
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2.280.500.000	2.280.500.000
39.7	Biro Organisasi		

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.796.472.100	1.796.472.100
4.01.02	Program Penataan Organisasi	2.003.527.900	2.003.527.900
40.1	Sekretariat Dprd		
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	162.075.757.712	168.228.947.588
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	190.200.945.888	231.730.997.316
4.	Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas		
1.3	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi		
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	56.879.574.000	55.252.669.139
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	886.790.232.869	887.011.812.368
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.969.891.500	4.066.192.500
1.3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.831.544.711	51.334.639.703
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	91.811.957.773	91.811.957.773
1.3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya		
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.507.104.000	3.507.104.000
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.063.340.000	1.063.340.000
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.450.052.000	1.450.052.000
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	34.748.847.000	34.748.847.000
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	134.765.785.450	124.336.570.485
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	21.617.214.550	22.292.214.550
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.920.000.000	6.920.000.000
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.714.264.290	18.616.694.663
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	500.000.000	500.000.000
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	22.600.000.000	22.600.000.000
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	107.043.157.000	109.043.157.000
2.10.06	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	600.000.000	600.000.000
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	980.000.000	980.000.000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
17.1	Dinas Perhubungan		
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.151.318.644	19.051.940.907
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.390.000.000	3.890.000.000
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	408.980.403	408.980.403
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	30.000.000	30.000.000
23.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.413.295.517	19.893.153.102
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.275.000.000	1.275.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.016.662.200	14.036.662.200
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.687.858.000	4.696.025.700
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.936.000.000	1.936.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.895.000.000	2.895.000.000
29.1	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral		
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.885.872.158	17.040.176.540
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	600.000.000	600.000.000
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	519.110.000	519.110.000
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.659.790.000	1.659.790.000
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.174.210.000	1.174.210.000
30.1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.257.566.549	19.479.431.589
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	70.000.000	58.750.000
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	380.000.000	580.000.000
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	1.200.000.000	1.250.000.000
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.213.000.000	1.309.400.000
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	800.000.000	791.750.000
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7.392.412.530	6.831.448.307
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	175.000.000	175.000.000
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi	80.000.000	80.000.000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
	Industri Nasional		
32.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.025.478.008	29.628.871.950
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.253.526.884	4.228.526.884
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.702.426	3.549.702.426
37.1	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.647.743.352	9.350.513.435
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.179.361.484	2.179.361.484
5. Kehidupan Yang Religius, Aman, Berbudaya Dan Inovatif			
1.1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	958.666.236.542	997.734.581.222
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	737.345.035.000	743.637.315.963
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.881.900.000	12.881.900.000
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	2.200.000.000	2.209.396.500
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	615.000.000	615.000.000
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	400.000.000	400.000.000
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	350.000.000	350.000.000
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	3.900.000.000	4.036.285.800
1.2	Rumah Sakit Jiwa		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.097.513.357	48.325.834.623
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	471.068.600	523.028.700
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.624.000	335.203.700
9.1	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.062.751.608	42.161.038.999
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.782.195.700	4.782.195.700
32.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.025.478.008	29.628.871.950

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.253.526.884	4.228.526.884
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.702.426	3.549.702.426
37.1	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.647.743.352	9.350.513.435
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.179.361.484	2.179.361.484
	Sekretariat Daerah		
39.2	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.168.609.000	1.276.046.500
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	87.888.450.028	106.644.928.368
6. Pembangunan Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana			
10.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.003.447.578	10.151.627.953
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	22.494.870.100	22.494.870.100
14.1	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.242.924.773	14.341.180.990
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.306.481.000	1.306.481.000
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	389.773.000	389.773.000
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	50.000.000	50.000.000
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	296.136.900	296.136.900
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	160.078.000	160.078.000
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	36.191.000	36.191.000
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000	50.000.000
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	81.219.000	81.219.000
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan	53.569.000	53.569.000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
	Lingkungan Hidup		
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	1.182.511.000	1.182.511.000
11.1	Dinas Sosial		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.599.579.910	23.143.029.340
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	526.682.950	526.682.950
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	249.999.500	263.499.500
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	10.833.813.022	11.070.313.022
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.370.059.665	1.370.059.665
1.06.06	Program Penanganan Bencana	947.505.677	1.147.505.677
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	333.747.273	483.747.273
23.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.413.295.517	19.893.153.102
3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.275.000.000	1.275.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	14.016.662.200	14.036.662.200
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.687.858.000	4.696.025.700
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.936.000.000	1.936.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.895.000.000	2.895.000.000
28.1	Dinas Kehutanan		
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	65.951.612.470	62.522.716.289
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	3.917.395.000	3.667.439.000
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	687.122.000	687.122.000
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.544.570.082	1.804.570.082
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	215.988.000	215.988.000
29.1	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral		
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.885.872.158	17.040.176.540
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	600.000.000	600.000.000
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	519.110.000	519.110.000

KODE	PRIORITAS PROVINSI	PAGU ANGGARAN 2023	PAGU PERUBAHAN 2023
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.659.790.000	1.659.790.000
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.174.210.000	1.174.210.000
32.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.025.478.008	29.628.871.950
5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.253.526.884	4.228.526.884
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.702.426	3.549.702.426
33.1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	262.221.358.560	112.175.332.218
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.509.470.079.575	1.654.815.361.183
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.913.542.200	7.913.542.200

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung

**PERUBAHAN RKPD 2023
PROVINSI LAMPUNG**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**BAB VI
PENUTUP**

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023. Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Rakyat Lampung Berjaya.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP.196509051991031004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi No. 223 Telp/ Fax. +62 721 486396

TELUKBETUNG-BANDAR LAMPUNG

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id>